



LAPORAN

EVALUASI PELAKSANAAN

RKPD DAN RENJA

PROVINSI NTB

TRIWULAN I TAHUN 2023

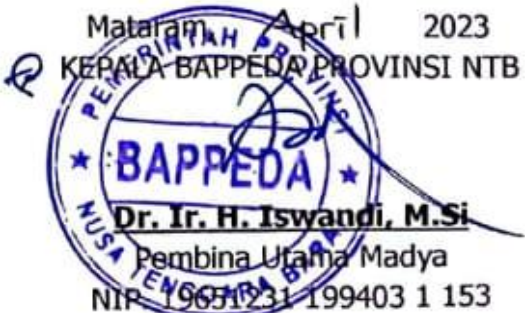
PEMERINTAH PROVINSI NTB
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan I Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan I merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan I Tahun 2023. Laporan ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB. Sebanyak 4 indikator atau 10,81% sudah dapat dihitung, sedangkan 33 indikator atau 89,19% belum dapat dihitung. Meskipun belum ada indikator yang memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut *on the track*.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataran, April 2023
 KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disu sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2023 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 harus mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan I merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan I Tahun 2023. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.986.832.908.383 dengan realisasi sebesar Rp. 5.301.816.692.031,34 atau 25,608 persen.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan I tahun 2023 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah, rata-rata capaian kinerja masih nihil. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena pekerjaan pada Triwulan I masih terfokus pada program kegiatan yang bersifat administratif, dan pembayaran hutang pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, rendahnya realisasi fisik dan serapan anggaran pada triwulan I ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sebanyak 4 indikator atau 10,81% sudah dapat dihitung, sedangkan 33 indikator atau 89,19% belum dapat dihitung. Indikator yang sudah dapat dihitung tersebut, belum memenuhi target capaian Tahun 2023. Indikator tersebut adalah Kontribusi PDRB sektor pertanian,

perikanan & kehutanan, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023, dimana sebanyak 5 indikator atau 4,85 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 6 indikator atau 5,85 persen belum memenuhi target dan masih terdapat 92 indikator atau 89,32 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran.....	3
1.5 Sistematika Penulisan Laporan.....	3
BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2023	4
2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023	5
2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2023.....	6
BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2023	10
BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023 TRIWULAN I	27
4.1 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sampai Tahun 2023.....	27
4.2.1 Indikator Kinerja Utama	27
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah.....	40
BAB V : PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Rekomendasi	49

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023. Sebagai gambaran bahwa dalam tahapan pencapaian RPJMD Provinsi NTB pada tahun pertama fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2018 dengan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat, tahap kedua penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang pada masa pandemi Covid-19, tahap ketiga dan keempat fokus pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat dengan penguatan industrialisasi dan penanggulangan kemiskinan dampak pandemi Covid-19 dan tahun kelima atau tahun terakhir adalah merupakan pencapaian kegemilangan masyarakat NTB yang sejahtera dan mandiri dengan Indeks Pembangunan Manusia yang semakin tinggi dengan mengusung Tema: "Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan".

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub

kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD provinsi NTB Tahun 2023 dan RKPD Provinsi NTB tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023;

2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2023 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2023.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2023. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2023. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2023.
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan I Tahun 2023. Bab ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2023 sampai Triwulan I.
- Bab V : Penutup

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2023

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2023 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang". Dalam rangka mewujudkan visi, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

Misi 1 "NTB TANGGUH DAN MANTAP" melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

Misi 2 "NTB BERSIH DAN MELAYANI" melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

Misi 3 "NTB SEHAT DAN CERDAS" melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

Misi 4 "NTB ASRI DAN LESTARI" melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

Misi 5 "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI" melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH" melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2023 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang".

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penanganan Covid Dan Pemulihan Ekonomi Daerah
2. Peningkatan Kualitas SDM
3. Peningkatan PAD Dan Pelayanan Publik, dengan strategi:
4. Peningkatan Industrialisasi Sektor Unggulan
5. Pembangunan Infrastruktur Layanan dasar dan kualitas lingkungan
6. Perluasan Lapangan Kerja
7. Percepatan Penurunan Kemiskinan

2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2023

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan”**. Adapun Prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2022 yaitu :

1. Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana, mendukung Prioritas Nasional 6;
2. Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi, mendukung Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5;
3. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik mendukung Prioritas Nasional 7
4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM, mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Nasional 3;
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM, mendukung Prioritas Nasional 3;
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan, mendukung Prioritas Nasional 6;
7. Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis Dalam Mendukung Investasi, mendukung Prioritas Nasional 1;
8. Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19, mendukung Prioritas Nasional 1;
9. Industrialisasi Produk Unggulan, mendukung Prioritas Nasional 1;
10. Penguatan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mendukung Prioritas Nasional 4.

Target Pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan Tahun 2023 disajikan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2.1. Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2023	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	115,83	
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,72	
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas				Point	81,17
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	86,60	
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50	
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14	
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	BB	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65	
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55	
				3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	
Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48					
	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30,49					
Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan						Point	63,10
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah			Tahun	13,79	
			Rata-rata Lama Sekolah			Tahun	7,07	
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	68,25	
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks Kualitas Air	Point	43,03	
					Indeks Kualitas Udara	Point	87,59	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2023
	dan lingkungan yang berkelanjutan	bersih dan berkelanjutan		Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,66
Indeks Kualitas Tutupan Lahan					Point	69,70	
Neraca pengelolaan sampah					%	100,00	
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan				Persentase Penanganan Sampah	%	70,00	
				Persentase Pengurangan Sampah	%	30,00	
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	75,56
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	68201,79
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100,00
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,20
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	80,59
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46
					Rasio Elektrifikasi	%	99,99
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.944
						%	4,50

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2023	
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	137,24	
						%	9,00	
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri	Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	179,91	
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	13,25	
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	0,00	
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07	
			Partisipasi politik masyarakat				%	85,20
					Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1,00
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				Point	61,40
					Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47
						Cakupan Kabupaten/Kot a Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kot a Layak Anak	%	100,00

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2023

Program pembangunan daerah didasarkan pada program yang mendukung sasaran pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023. Adapun program pembangunan daerah pada Tahun 2023 sebanyak 120 program dari 147 Program perangkat daerah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penanganan Bencana
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)
6. Program Pengelolaan Pelayaran
7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Penyelenggaran Pengawasan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Penataan Organisasi
16. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
17. Program Kepegawaian Daerah
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Program Pendaftaran Penduduk
20. Program Pencatatan Sipil
21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
22. Program Peningkatan Kerjasama Desa
23. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
24. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
25. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
28. Program Pembinaan Perpustakaan

29. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
30. Program Pelayanan Penghubung
31. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
32. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
33. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
34. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
35. Program Pengelolaan Pendidikan
36. Program Pengembangan Kurikulum
37. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
38. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
39. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
40. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
41. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
42. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
44. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
47. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
48. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50. Program Pengelolaan Hutan
51. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
52. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
53. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
54. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
55. Program Pengelolaan Persampahan
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
57. Program Promosi Penanaman Modal
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
61. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
62. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
63. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
64. Program Penyuluhan Pertanian

65. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
66. Program Pengelolaan Hutan
67. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
68. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
69. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
70. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
71. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
72. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
73. Program Rehabilitasi Sosial
74. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
75. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
76. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
77. Program Penanganan Kerawanan Pangan
78. Program Pengawasan Keamanan Pangan
79. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
80. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
81. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
82. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
83. Program Pengembangan Perumahan
84. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
85. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
86. Program Pengembangan Ekspor
87. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
88. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
89. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
91. Program Pemasaran Pariwisata
92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
94. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
95. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
96. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
97. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
98. Program Pengembangan Umkm
99. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
100. Program Penempatan Tenaga Kerja
101. Program Hubungan Industrial
102. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

103. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
104. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
105. Program Kesejahteraan Rakyat
106. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
107. Program Pengembangan Kebudayaan
108. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
109. Program Pembinaan Sejarah
110. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
111. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
112. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum
113. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
114. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
115. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
116. Program Perlindungan Perempuan
117. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
118. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
119. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
120. Program Perlindungan Khusus Anak

Pemetaan program Pembangunan Daerah kedalam sasaran pembangunan pada Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Program Pembangunan Daerah Kedalam Sasaran Pembangunan Pada Tahun 2023

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah					
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	115,83		
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,65		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	40,09	14.445	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,50		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7.543	Dinas Sosial
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	81,17		
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan jalan	%	86,60		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	86,60	931.804	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	76,28	342.401	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81,63	14.665	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40		
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52,58		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66,06	2.261	Dinas Perhubungan
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi					
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB		
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	2.275.817	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	75	5.689	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	3.807	INSPEKTORAT
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48,89		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	7,55	1.402	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	97		
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38,44	1.668	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	54,03	46.184	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	14.444	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	37.833	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	100	2.917	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	26,66	2.529	INSPEKTORAT
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		3.842	Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	9.485	Biro Pemerintahan
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	19	21.515	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		135		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		136		
	Nilai Aspek Sistem Informasi		19		
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,10	51.655	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,04	-	
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,15	-	
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0,62		
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,90	880	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	654	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	3.155	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%	25	267	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	80	16.947	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	65	6.229	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	1.531	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50	1.492	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	90	300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	3.406	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	624	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang	43.000		Badan Penghubung Daerah
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah					

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Point	73,05		
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kehatan yang terakreditasi	%	85	490.193	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan persediaan kehatan	%	97		
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kehatan yang sesuai standar	%	80		
	Persentase pelayanan kehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	100		
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100		
	Persentase fasilitas pelayanan kehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	3.651	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	95	240	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	90	163.140	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	76,19	29.810	Rumah Sakit Jiwa Mutiarra Sukma
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	80,00	144.479	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	30,49		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	10,41	-	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	80	5.060	Dinas Kesehatan
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Point	63,10		
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79		
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,07		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	1.486.214	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	95,28		
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98,02		
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:10		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	1.987	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	208.215	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100		
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100		
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	100		
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		80		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	6,5	195	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	832	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.297	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%	100	31.488	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan					

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68,46		
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	43,03		
	Indeks Kualitas Udara	Point	87,59		
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	71,48		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24,242424	1.025	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	30	2.835	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	3	233	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	232	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	30	605	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	632	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	60	641	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,70		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	100	61.711	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30.503	2.843	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	48,67	2.125	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4,00	14.296	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,31	3.018	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Neraca pengelolaan sampah (%)	%	100,00		
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	70,00		
	Persentase Pengurangan Sampah	%	30,00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	100	15.916	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi					
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	75,56		
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	17.814		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	60	1.099	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100	2.629	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	93	1.954	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	60	2.703	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	428	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	10	135.417	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	1.708	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	8.464	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	1.279	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%	2,05	64.205	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	96,79	267.361	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	10	-	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,5	1.229	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	18.895	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	9,5	15.330	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	256.572	11.895	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.243.385	32.729	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang- undangan	%	99,93	8.943	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	215700	2.897	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	-	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	2.356	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4,5	53.398	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	37.284	Dinas Sosial
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,20		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	86,62	771	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	11.466	Dinas Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	3,77	1.142	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	90,00	1.857	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	80,59		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	80,59	10.224	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100	-	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	253391,4	587.291	Dinas Perumahan dan Permukiman
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99,99		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5,57	1.992	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99,99	5.546	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	7.064	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98,91		
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	80	874	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	5.179	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	7	4.071	Dinas Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	90	3.915	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	37.550	Dinas Perdagangan
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11.944		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	4.834	Dinas Perdagangan
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	4,50		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	137,24		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	100	16.580	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%	50	-	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		7.392	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		607	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		3.506	Dinas Pariwisata
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)	%	9,00		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	179,91		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	102.322	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	3,55	3.018	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	2.043	Dinas Perindustrian
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6,71	4.807	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	56,75	7.967	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.297	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	3.482	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	57,48	3.391	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	23	1.026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	3.466	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan					
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	13,25		
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	0,00		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	1.527	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	11.105	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292.643	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	70	24.519	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	37	-	
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100	-	
	Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81,82	6.405	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1.427	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100,00	11.445	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	86,21	2.437	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	5.728	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	85,20		
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1,00		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	100	43.528	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	83,01	1.631	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61,4		
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47		
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	100		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	65,28	6.231	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	83,07	2.837	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	15	1.341	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
					Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	201	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	42,00	1.491	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		2.124	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%			

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023 TRIWULAN I

4.1 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sampai Tahun 2023

Laporan evaluasi RKPD Triwulan I merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan I Tahun 2023. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.986.832.908.383 dengan realisasi sebesar Rp. 5.301.816.692.031,34 atau 25,608 persen

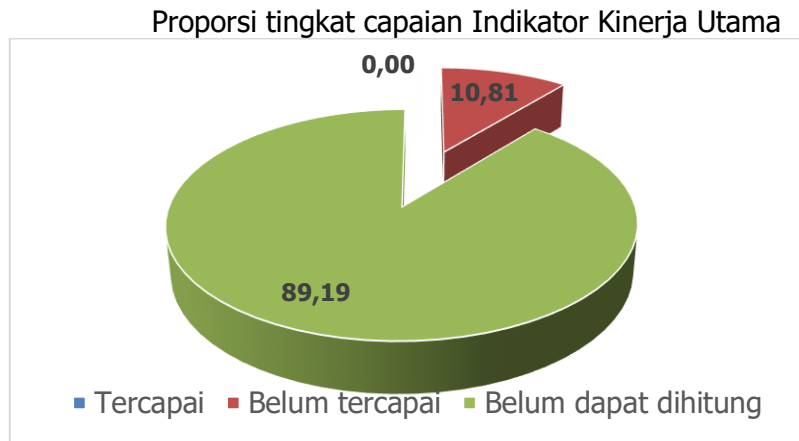
Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan I tahun 2023 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah, rata-rata capaian kinerja masih nihil. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena pekerjaan pada Triwulan I masih terfokus pada program kegiatan yang bersifat administratif, dan pembayaran hutang pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, rendahnya realisasi fisik dan serapan anggaran pada triwulan I ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2023.

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, telah ditetapkan sebanyak 103 Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut sampai dengan Tahun 2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan RPJMD 2019-2023, diketahui bahwa terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB

Tahun 2019-2023. Sebanyak 4 indikator atau 10,81% sudah dapat dihitung, sedangkan 33 indikator atau 89,19% belum dapat dihitung. Indikator yang sudah dapat dihitung tersebut, belum memenuhi target capaian Tahun 2023. Indikator tersebut adalah Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.



Sumber: data diolah

Tabel 1. Target dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2019-2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					2022			2023			
							2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	142,90	139,4	129	128,05	122,3	119,41	119,83	99,65	115,83			
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,53	0,55	0,57	0,63	0,63	0,63	0,72	114,29	0,72			
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	73,69	74,6	76,02	77,77	78,81	79,84	81,31	101,84	81,17			
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	80,28	80,05	84,01	85,36	85,36	100,00	86,60			
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,54	50,63	50,76	57,07	50,88	52,17	54,50	104,47	54,50			
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	73,72	74,76	78,64	90,29	88,00	86,86	92,00	105,92	89,14			
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	CC	CC	B	B	B	BB	B	95,67	BB			
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP		
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	32,15	33,77	34,77	35,09	35,46	36,97	43,18	116,80	38,65			
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	B (>60 - 70)	B (62,53)	BB	B	BB	BB (76,01 - 80,00)	BB	100,00	A (80,01 - 90,00)			
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,57	0,60	0,54	0,59	0,69	0,70	0,64	91,29	0,72			
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,42	4,56	3,63	3,56	3,54	4,53	3,71	81,90	4,55			

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					2022			2023		
							2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian	% Tingkat Capaian
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	70,08	70,57	71,20	71,55	71,83	72,43	72,42	99,99	73,05		
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,75	66,28	66,51	66,69	67,08	67,07	100,00	67,48		
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37,20	33,49	25,50	23,33	19,23	30,99	16,84	145,66	30,49		
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	60,39	60,85	61,68	62,42	63,21	62,74	64,14	102,24	63,10		
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,7	13,90	13,73	13,96	101,68	13,79		
					Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	7,27	7,31	7,38	7,04	7,61	108,10	7,07		
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	56,99	75,16	64,56	70,83	69,89	68,22	70,56	103,76	68,25		
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	20,25	74,63	40,23	50,98	45,10	42,93	43,39	101,07	43,03		
					Indeks Kualitas Udara	Point	88,02	87,17	87,40	88,63	88,52	87,56	89,30	101,99	87,59		
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	-	-	67,49	80,22	70,89	89,48	102,11	87,66		
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	61,27	66,56	65,67	44,82	65,59	68,70	65,61	95,50	69,70		
		Neraca pengelolaan sampah			%	-	-	41,71	44,82	49,02	85,00	54,98	64,68	100,00			
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	-	-	34,91	37,63	39,68	60,00	42,20	70,33	70,00			
				Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	6,80	7,19	9,34	25,00	12,78	51,12	30,00			
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	69,76	70,99	72,03	71,19	71,27	74,68	72,15	96,61	75,56		
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	10.024	11.600	14.879	15.428	21606,67	140,05	68201,79		
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	22,03	23,51	23,06	23,2294016	26,4	23,71	26,14	110,25	23,88	22,06	92,38
				Meningkatnya jaminan kesehatan sosial bagi	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00		

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					2022			2023		
							2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian	% Tingkat Capaian
	pertanian, pariwisata dan industrialisasi			penduduk miskin	jaminan sosial dan kesehatan												
			Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	77,80	78,30	85,30	91,30	90,40	86,70	93,30	107,61	87,20			
			Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	-	70,48	72,59	74,88	78,76	78,45	79,11	100,84	80,59			
				Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	78,8	91,36	87,78	80,91	81,83	101,14	82,46			
				Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	99,55	99,98	99,98	99,88	99,98	100,10	99,99			
				Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	53,04	56,75	56,35	62,53	63,47	65,80	62,30	94,68	68,95			
			Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,70	3,16	1,87	0,68	2,12	3,0 - 4,0	6,23	44,25	3,0 - 4,0			
			Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	10.640	10.351	10.377	11.604	10681,00	92,05	11.944			
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	7,27	-4,59	-0,08	-28,24	1,35	3,00	24,68	822,67	4,50	5,51	122,44
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	112,36	76,13	117,2	-444,54	15,20	129,78	282,70	217,83	137,24	13,80	10,06
	Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	2,00	2,00	4,57	7,08	6,75	7,50	7,40	98,67	9,00	3,26	36,22	
			Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	240,99	56,28	165	-110,55	94,66	173,02	87,99	50,86	179,91	31,50	17,51	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					2022			2023		
							2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian	% Tingkat Capaian
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,42	4,22	3,01	3,19	2,89	109,40	3,17	3,73	82,33
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	18,05	17,25	12,71	13,09	10,67	14,05	8,77	137,58	13,25		
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	8,70	38,10	46,15	57,14	25	20,00	50,00	150,00	0,00		
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,45	4,65	4,88	52,78	31,21	5,72	22,53	393,88	6,07		
			Partisipasi politik masyarakat			%	78,44	77,50	82,80	80	NA	84,57	80,00	94,60	85,20		
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,40	0,50	0,60	0,65	0,61	0,90	1,26	140,00	1,00		
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59,95	60,06	55,81	51,96	52,01	61,16	53,12	86,85	61,40		
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	17,79	17,93	18,60	26,87	27,24	19,27	27,39	142,14	20,47		
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	10	40	40	50	80	70,00	87,50	100,00		

Berdasarkan data capaian pada periode tahun 2019-2022, pencapaian sasaran pembangunan daerah periode 2019-2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

I. Pencapaian Tujuan Pembangunan

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, dari 6 Misi pembangunan, terdapat 10 (sepuluh) tujuan pembangunan dengan 13 indikator kinerja daerah. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 4 tujuan pembangunan daerah yang telah memenuhi bahkan melampaui target akhir pembangunan pada tahun 2023, 5 tujuan dengan capaian on the track dengan tingkat capaian diatas 85% dan satu tujuan yang masih rendah pencapaiannya. Pencapaian tujuan pembangunan berdasarkan Misi Pembangunan 2019-2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut: yaitu tujuan pembangunan Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan dengan indikator kinerja Indeks Aksesibilitas dari kondisi awal 74,60 pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,31 poin pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 81,17 poin atau dengan tingkat capaian sebesar 100,17%. Pencapaian ini didorong adanya Peraturan Daerah no 77 tahun 2022 tentang pembangunan infrastruktur jalan tahun jamak, meningkatnya akses air minum, rasio elektrifikasi, akses sanitasi, konektivitas antar wilayah, kemantapan irigasi, serta akses rumah layak huni. Kemudian tujuan pembangunan Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan dari 60,85 pada tahun 2018 meningkat menjadi 64,14 pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 63,10.

Adapun tujuan pembangunan lain yang melampaui target adalah Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana capaian tahun 2018 sebesar 56,99 meningkat menjadi 70,56 pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 68,46. Selain itu tujuan pembangunan Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan dengan indikator kinerja Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) juga mengalami peningkatan yg sangat signifikan dari kontraksi 4,59% pada tahun 2018 meningkat menjadi 24,68%

II. Pencapaian Sasaran Pembangunan

- I. Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,63 Point dengan realisasi 0,72, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 114,29%.

Untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangana bencana, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022 yaitu meningkatkan pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana, meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta meningkatkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Sampai dengan tahun 2022, Persentase perangkat daerah di provinsi NTB yang telah menerapkan kegiatan penanggulangan bencana sudah mencapai 100%, serta tetap meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana di lingkup perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kota.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana BPBD provinsi NTB memiliki 1 (satu) program kegiatan yaitu program penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana untuk mendukung penanggulangan bencana melalui beberapa kegiatan yaitu:

- Memfasilitasi Desa Tangguh Bencana
- Memfasilitasi Sekolah / Madrasah Aman Bencana
- Pelatihan Pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA)
- Menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)
- Menyusun dokumen rencana kontijensi.
- Menyiapkan sarana dan prasarana beserta data laporan korban bencana
- Melakukan pemindahan warga/masyarakat dari zona berisiko bencana ke lokasi yang lebih aman
- Melakukan pencarian dan evakuasi korban terdampak bencana
- Penyediaan dan pendistribusian logistik sesuai dengan kebutuhan korban terdampak bencana
- Pengelolaan data dan informasi terkait kebencanaan.

2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah, dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan dan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi. Pada tahun 2022, Persentase Kemantapan jalan ditargetkan sebesar 85,36% dengan realisasi 85,36%, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%. Sedangkan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi ditargetkan sebesar 52,17% dengan realisasi 54,50%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 104,47%

Ralisasi capaian tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar 80,05 %. Realisasi capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun berikutnya yakni tahun 2021 dan 2022 yang mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 84,01 % dan 85,36 %, hal ini tercapai karena adanya dukungan penanganan jalan melalui program percepatan jalan (Perda Percepatan Jalan) yang berasal dari pembiayaan APBD dan penanganan jalan dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara pada tahun 2022 mencapai 540,56 Km, sehingga Panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 1.247,07 Km atau 85,36% dari total Panjang jalan 1.484,43 Km. sementara itu Kemantapan Sistem Irigasi sebagian besar didukung melalui dana alokasi khusus. Pada Tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 untuk mengelola 35 Daerah Irigasi dengan luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha. Secara keseluruhan terdapat 58.105 Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 413,05 Km (57 %), rusak ringan 61,78 km (9 %), rusak sedang 86,05 km (12 %) dan rusak berat 161,03 km (22 %).

Adapun cakupan air minum, dapat ditingkatkan cakupannya pengelolaan SPAM dengan Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan sebanyak 30 unit dengan jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun pada tahun 2022 sebanyak 8.010 KK

3. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, dengan indikator kinerja Persentase konektivitas transportasi publik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 86,86% dengan realisasi 88,57%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,97%.

Pencapaian konektivitas antar di wilayah didukung oleh peningkatan persentase rute angkutan darat dan angkutan laut. Pada tahun 2022, persentase angkutan darat telah mencapai 98,33% dengan rute angkutan darat di NTB sudah terpenuhi sejumlah 122 rute dengan penambahan 2 (dua) rute angkutan yakni 1 (satu) rute angkutan perintis yaitu rute Terminal Mandalika – Leweng dan 1 (satu) rute angkutan KSPN dengan rute BIZAM – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal. Adapun angkutan laut mencapau 84,62% dengan jumlah rute yang terpenuhi sejumlah 22 (dua puluh dua) rute dengan penambahan 1 (satu) rute angkutan Bali – Tawun

II. Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, dengan indikator kinerja Opini BPK. Pada tahun 2022 ditargetkan mempertahankan Opini BPK WTP dengan realisasi WTP, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Opini Audit yang diterbitkan jika Laporan Keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika Laporan Keuangan diberikan opini artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, walaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembalikan keputusan. Di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah memenuhi kriteria:

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, yaitu meliputi Keberadaan Aset, Kelengkapan Bukti dan Nilai Aset.

Pencapaian WTP Provinsi NTB merupakan Prestasi yang ke-11 secara berturut-turut dari tahun 2011-2022

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 36,97% dengan realisasi 43,18%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 116,80%.

Target PAD tahun 2022 yang semula sebesar Rp2.571.637.450.300,- bertambah dalam anggaran perubahan menjadi Rp2.735.041.230.300,- dan kemudian direvisi kembali menjadi Rp2.738.892.515.300,-. Target PAD tersebut merupakan 48,30 persen dari keseluruhan target Pendapatan Daerah Provinsi NTB sebesar Rp5.670.486.399.401,- Sampai akhir tahun anggaran 2022, realisasi penerimaan PAD telah mencapai Rp2.287.653.655.567,- atau 83,52 persen dari target tahun 2022 dan meningkat 21,14 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan PAD sebagian besar bersumber dari peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan BLUD.

Penerimaan PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Meningkatnya

Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP. Pada tahun 2022, kategori BB dengan realisasi BB, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi NTB oleh KemenPAN RB pada tahun 2022 menunjukkan nilai 72,77 dengan "predikat B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik yang ditandai dengan meningkatnya beberapa komponen yang dinilai antara lain perencanaan kinerja yang mencakup RPMD, Renstra, PK dan Dokumen lainnya telah disusun dengan baik dan telah dibuat secara berjenjang (cascading) oleh seluruh perangkat daerah sampai ke level operasional. Dalam pengukuran kinerja, telah dilakukan secara berkala triwulanan atas pencapaian kinerja dengan mengacu pada rencana aksi yang telah disusun. Sementara itu, dalam hal pelaporan kinerja, pemerintah provinsi telah menyusun akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai yang telah diperjanjikan dan telah dipublikasi dalam website PPID. Sedangkan terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTB untuk mengevaluasi implementasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur NTB nomor 77 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

3. Meningkatnya Profesionalisme ASN, dengan, dengan indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,70 point dengan realisasi 0,51 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 72,86%.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 4,53 point dengan realisasi 3,71 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 81,90%.

III. Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup dan Persentase Balita *Stunting*. Pada tahun 2022, Angka Harapan Hidup ditargetkan 67,08 tahun dengan realisasi 67,07 tahun, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%. Sedangkan Persentase Balita *Stunting*

- ditargetkan 30,99% dengan realisasi berdasarkan survey EPPGBM sebesar 16,99%, melalui target dengan tingkat capaian sebesar 145,18%.
2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Pendidikan, dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah dan Rata rata Lama Sekolah. Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah ditargetkan sebesar 13,73 tahun dengan realisasi 13,96 tahun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,68%. Sedangkan Rata rata Lama Sekolah ditargetkan sebesar 7,04 tahun dengan realisasi 7,61 tahun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 108,10%
- IV. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Pada tahun 2022, Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 42,93 point dengan realisasi 43,39 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,07%. Indeks Kualitas Udara ditargetkan sebesar 87,56 point dengan realisasi 89,30 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,99%. Indeks Kualitas Air Laut ditargetkan sebesar 70,89 point dengan realisasi 89,48 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 102,11%. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan ditargetkan sebesar 68,70 point dengan realisasi 65,61 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 95,50%.
 2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah. Pada tahun 2022, Persentase Penanganan Sampah ditargetkan sebesar 60% dengan realisasi 42,20%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 70,33%. Sedangkan Persentase Pengurangan Sampah ditargetkan sebesar 25% dengan realisasi 12,78%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 51,12%.
- V. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
1. Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha), dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 15,43 Triliun dengan realisasi sebesar Rp.21,61 Triliun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 140,05%.

2. Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas, dengan indikator kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 23,88% dengan realisasi sebesar 22,06 dengan tingkat capaian sebesar 92,38%.
3. Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin, dengan indikator kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 100%.
4. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, dengan indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 86,70 poin dengan realisasi sebesar 106,99%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 123,40%.
5. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin, dengan indikator kinerja Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, dan Cakupan Rumah Layak Huni (RLH). Pada tahun 2022, Cakupan Air Minum ditargetkan sebesar 78,45% dengan realisasi sebesar 95,40%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 121,61%. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak ditargetkan sebesar 80,91% dengan realisasi sebesar 83,12%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 102,73%. Rasio Elektrifikasi ditargetkan sebesar 99,88% dengan realisasi sebesar 99,98%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 100,10%. Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) ditargetkan sebesar 65,80% dengan realisasi sebesar 62,30%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 94,68%.
6. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok, dengan indikator kinerja Inflasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 3,0 - 4,0% dengan realisasi sebesar 6,23%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 44,25%.
7. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan indikator kinerja Pengeluaran per kapita. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 11,60 juta dengan realisasi sebesar Rp. 10,68 juta, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 92,05%.
8. Meningkatnya daya saing pariwisata, dengan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 137,24 miliar dengan realisasi sebesar Rp. 13,80 miliar, belum memenuhi target dengan tingkat capaian 10,06%.
9. Meningkatnya daya saing industri, dengan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.179,91 miliar

dengan realisasi sebesar Rp.31,50 miliar, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 17,51%.

10. Menurunnya pengangguran terbuka, dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,17% dengan realisasi sebesar 3,73%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 82,33%.

VI. Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

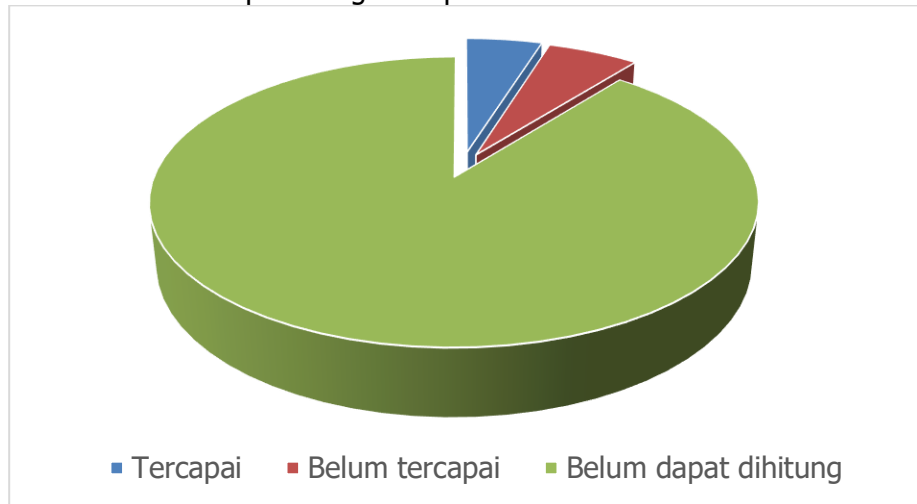
1. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase penurunan konflik sosial. Pada tahun 2022 ditargetkan menurun sebesar 20% dengan realisasi meningkat sebesar 50%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 50%.
2. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan menurun sebesar 5,72% dengan realisasi menurun sebesar 55%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 961,54%.
3. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,90% dengan realisasi sebesar 0,80%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 88,89%.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada tahun 2022, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan ditargetkan sebesar 19,27% dengan realisasi sebesar 27,13%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 140,79%. Sedangkan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 70%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 87,50%

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Salah satu parameter keberhasilan pembangunan yang menunjukkan gambaran pencapaian pembangunan Daerah dan sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan, dapat diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD juga sebagai dasar dalam melakukan

evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Proporsi tingkat capaian IKD Provinsi NTB



Sumber: Perangkat Daerah, data diolah

Indikator Kinerja Daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu :

1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

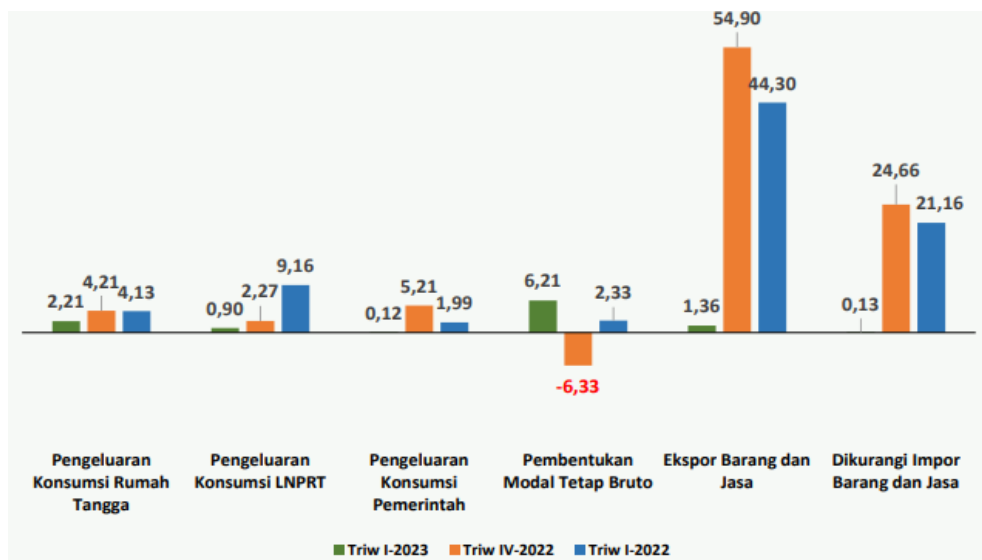
Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	4,5-5,5	4,65	100,00
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0		
3	Tingkat Kemiskinan	%	11,92		
4	Gini Ratio	Point	0,297		
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	70,09		

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2022

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2023 terhadap tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,65% (termasuk pertambangan bijih logam), jika dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,57 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PMTB yang tumbuh sebesar 6,21 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 2,21 persen dan 1,36 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan pengurang dalam PDRB Menurut Pengeluaran mengalami pertumbuhan sebesar 0,13 persen.

Gambar Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)



2. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 7 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 1. Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Kriminalitas	Point	13,25		
2	Indeks Aksesibilitas	Point	81,17		
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68,25		
4	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	90,31		
5	Indeks Risiko Bencana	Point	115,83		
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB		
7	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55		

Sumber: Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022

Terdapat 7 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesabilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) , Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Resiko Bencana dan Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik. Seluruh indikator pada Aspek Daya Saing Daerah capaiannya belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan mewujudkan kondusifitas daerah, menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menyiapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pelayanan publik yang paripurna.

3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 91 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator, urusan pilihan sebanyak 20 indikator, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator. Adapun capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
C	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.01	Pendidikan				
1	Indeks Pendidikan	Point	63,10		
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79		
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,07		
1.02	Kesehatan				
4	Indeks Kesehatan	Point	73,05		
5	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	83,00		
6	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46		
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48		
8	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30,49		
9	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
10	Persentase Kemantapan jalan	%	86,60		
11	Cakupan Air Minum	%	80,59		
12	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50		
13	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	27,20		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
14	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95		
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
15	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07		
15	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00		
16	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00		
17	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	30,18		
18	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,65		
1.06	Sosial				
19	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00		
20	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,37		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
2.01	Tenaga Kerja				
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	3,73	82,33
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
22	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61,40		
23	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,52		
24	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	21,00		
25	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47		
26	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	100,00		
2.03	Pangan				
27	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,20		
2.04	Lingkungan Hidup				
28	Indeks Kualitas Air	Point	43,03		
29	Indeks Kualitas Udara	Point	87,59		
30	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,66		
31	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	100,00		
32	Persentase Penanganan Sampah	%	70,00		
33	Persentase Pengurangan Sampah	%	30,00		
2.05	Pertanahan				
34	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
35	Rasio Penduduk BerkTP Persatuan Penduduk	rasio	0,88	0,96	109,09
35	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
36	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	33,69		
37	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	91,00		
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
38	Pertumbuhan Penduduk	%	0,95		
2.09	Perhubungan				
39	Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14		
2.10	Komunikasi dan Informatika				
40	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Kolaborasi		
41	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	75		
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
42	Persentase Koperasi Aktif	%	70,00		
2.12	Penanaman Modal				
43	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	68.202		
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
44	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	210		
45	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15		
46	Proporsi wirausaha muda	%	68,39		
2.14	Statistik				
47	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	65,00		
2.15	Persandian				
48	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	III+		
2.16	Kebudayaan				
49	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	33,04		
2.17	Perpustakaan				
50	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100,00		
51	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	39,86		
2.18	Kearsipan				
52	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	100,00		
3	URUSAN PILIHAN				
3.01	Kelautan dan Perikanan				
53	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,74		
54	Produksi Perikanan	Ton	1.499.957		
55	Nilai Tukar Nelayan	%	>110		
3.02	Pariwisata				
56	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	4,50	5,51	122,44

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
57	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	100,00		
58	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,35	1,85	55,22
59	Angka kunjungan wisatawan	orang	23.100.000		
60	Persentase Geosites yang Tertata	%	50,00		
61	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	137,24	13,8	10,06
3.03	Pertanian				
62	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88	22,06	92,38
63	Nilai Tukar Petani	Point	>105	115,1	100,00
3.04	Kehutanan				
64	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,70		
65	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	20,08		
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral				
66	Rasio Elektrifikasi	%	99,99		
3.06	Perdagangan				
67	Indeks Daya Beli	Point	75,56		
68	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.944		
3.07	Perindustrian				
69	Pertumbuhan Industri	%	9,00	3,26	36,22
70	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	179,91	31,50	17,51
71	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	3,55		
3.08	Transmigrasi				
72	Cakupan Penempatan Transmigran	%	100		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	Administrasi Pemerintahan				
73	Ranking Nasional LPPD	Ranking	3,0747		
74	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100,00		
75	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100,00		
76	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	45,00		
77	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	4		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	Perencanaan				
78	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00		
5.02	Keuangan				
79	Opini BPK	Status	WTP		
80	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,54		
81	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
5.03	Kepegawaian				
82	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72		
5.04	Pendidikan dan Pelatihan				
83	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,28		
5.05	Penelitian dan Pengembangan				
84	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	30,00		
5.06	Penghubung				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	Pengawasan				
86	Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)		
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
7.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				
87	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4,89		
88	Partisipasi Politik Masyarakat	%	85,20		
89	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	50,00		
90	Persentase penurunan konflik sosial	%	0,00		
91	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1,00		

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2022

Ket. NA= Not Available

Dari 91 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 4 indikator tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 6 indikator belum memenuhi target, dan masih terdapat 81 indikator belum tersedia (Not Available) karena belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Beberapa indikator yang sudah dapat dihitung yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi, Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk, ertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Rata-rata Lama Menginap, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Nilai Tukar Petani, ertumbuhan Industri, dan Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan.

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan evaluasi RKPD Triwulan I merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan I Tahun 2023. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.986.832.908.383 dengan realisasi sebesar Rp. 5.301.816.692.031,34 atau 25,608 persen.
2. Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan I tahun 2023 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah, rata-rata capaian kinerja masih nihil. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena pekerjaan pada Triwulan I masih terfokus pada program kegiatan yang bersifat administratif, dan pembayaran hutang pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, rendahnya realisasi fisik dan serapan anggaran pada triwulan I ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2023
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sebanyak 4 indikator atau 10,81% sudah dapat dihitung, sedangkan 33 indikator atau 89,19% belum dapat dihitung. Indikator yang sudah dapat dihitung tersebut, belum memenuhi target capaian Tahun 2023. Indikator tersebut adalah Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
4. Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023, dimana sebanyak 5 indikator atau 4,85 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 6 indikator atau 5,85 persen belum

memenuhi target dan masih terdapat 92 indikator atau 89,32 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Perlu dijabarkan program Prioritas dan Program Unggulan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan serta menetapkan besaran target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan. Penjabaran ini perlu dilakukan pada saat dilakukan perubahan RKPD Tahun 2023;
2. Perlu dilakukan pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah untuk memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas dan program unggulan, karena program prioritas dan program unggulan secara nomenklatur berbeda dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
3. Perlu dilakukan penyesuaian indikator dan target baik indikator dan target di Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
4. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan, karena beberapa indikator tidak hanya dapat dicapai dengan dukungan APBD Provinsi;
5. Terhadap target-target yang belum tercapai agar dilakukan pengawalan dan memfokuskan penganggaran sehingga pencapaian target kinerja di tahun depan dapat diakselerasi;
6. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan secara lebih intensif dan berkala sehingga dapat mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah														
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Point											
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,65		0,65	2.255.513.036	0,65	2.255.513.036		358.864.890		15,91	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase terbentuknya DESTANA & SMAB	%	40,09	14.445.499.395	32,78	1.080.862.486		1.080.862.486		107.887.390		9,98	Pelaksana BPBD
		Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,50		67,43								
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Dokumen Perencanaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang ditanggulangi	Dokumen	420	3.524.792.112	38	808.306.485		808.306.485		46.144.602		5,71	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Fasilitasi DESTANA & SMAB	Dokumen	30	853.307.397	2	777.304.615		777.304.615		31.398.667		4,04	
	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Dokumen Jitupasna yang disusun	Dokumen	4	354.723.830	30	31.001.870		31.001.870		14.745.935		47,56	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon penanggulangan bencana yang disusun	Dokumen	5	319.414.293	2	-		-		-			
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	%	100	4.179.305.283	100	248.154.159		248.154.159		50.240.137		20,25	
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Darurat Bencana	%	100	124.207.684	100	64.921.387		64.921.387		14.953.490		23,03	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	1.586.446.729	100	35.001.279		35.001.279		10.910.779		31,17	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pendistribusian Logistik	%	100	2.468.650.870	25	148.231.494		148.231.494		24.375.869		16,44	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	%	100	129.970.171		24.401.841		24.401.841		11.502.651			
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah kerjasama yang dikelola	Kegiatan	2	70.000.000	-	24.401.841		24.401.841		11.502.651			
	Pengelolaan, Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola	Aplikasi	1	59.970.171	-								
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7.543.347.993	100	1.174.650.550		1.174.650.550		250.977.500		21,37	Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi							1.174.650.550		1.174.650.550		250.977.500			
	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana alam yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan	Jiwa			16000	230.000.000		230.000.000		-		-	
	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang	KK			4000	-		-		-		-	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana yang tertampung di tempat pengungsian	Jiwa			600	207.500.000		207.500.000		-		-	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani secara khusus	Jiwa			30900	271.050.550		271.050.550		62.347.900		23,00	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah LDP (Layanan Dukungan Psikososial) yang tingkatkan	Jiwa			900	466.100.000		466.100.000		188.629.600		40,47	
													18,69	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan		Indeks Aksesibilitas	Point											
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan jalan	%	86,60		86,60	138.902.122.352	86,60	138.902.122.352		35.599.632.727		25,63	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan Mantap	%	86,60	931.804.007.968	85,36	138.902.122.352		138.902.122.352		35.599.632.727		25,63	Dinas PUPR
Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	km			541	138.902.122.352		138.902.122.352		35.599.632.727		25,63	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan yang tersusun	kegiatan Lokasi km unit			2 ; 12 ; 20 ; 6	116.810.700		116.810.700		20.162.000		17,26	
	Pengelolaan Leger Jalan	Panjang leger jalan provinsi yang dikelola	km			0	-		-		-			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey kondisi jalan / jembatan yang dilaksanakan	km unit			1484,43 ; 784	-		-		-		49,11	
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	km			541	81415232452		81415232452		24.518.129.666		79,94	
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur													
	Rekonstruksi Jalan						16214444700		16214444700		37.302.911		0,23	
	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	km			0	0		0		-			
	Penggantian Jembatan						17570000000		17570000000		-		-	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km			1484,43 ; 784								
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan provinsi yang dipelihara secara rutin	Km			79	23585634500		23585634500		11.024.038.150		46,74	
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m			70	0		0		-			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	m				0		0		-			
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan/dan jembatan	Dok			2	0		0		-			
													30,57	
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50		54,50	146.894.637.594	54,50	146.894.637.594		37.524.067.181		25,54	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Cakupan Pelayanan Areal Irigasi	%	76,28	342.401.082.017	75,37	1,46895E+11		1,46895E+11		37.524.067.181		25,54	Dinas PUPR
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Unit			10	91283310894		91283310894		23.952.711.379		26,24	
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dok			1								
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						213000640		213000640		310			
	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Jumlah Sumur Air Tanah yang dibangun	Lokasi			10	16.340.421.169		16.340.421.169		5.408.113.869		33,10	
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang di rehab	Buah			10	19.869.920.125		19.869.920.125		9.297.464.550		46,79	
	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Peralatan hidrologi dan kualitas air yang dikelola dan disediakan	Set			3	153.298.160		153.298.160		54.588.250		35,61	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Orang			100								
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Lokasi			10	5.433.200.100		5.433.200.100		1.099.093.900		20,23	
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dipelihara	Buah			200	36.805.819.900		36.805.819.900		5.137.075.398		13,96	
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	Lokasi			95	12.467.650.800		12.467.650.800		2.956.375.103		23,71	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Luas areal layanan irigasi fungsional kewenangan provinsi yang dikelola	Ha			1006								
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan lingkungan hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun	Dok			5	55.611.326.700		55.611.326.700		13.571.355.802		24,40	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	DI			7	645.580.100		645.580.100		500.815.100		77,58	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	DI			1	1.770.850.100		1.770.850.100		555.256.000		31,36	
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Ha			1000	53.171.976.500		53.171.976.500		12.507.644.702			
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya O dan P Jaringan Irigasi Permukaan	DI			7	-		-		-			
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang dipelihara	Ha			0	-		-		-			
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi	DI			19	22.920.000		22.920.000		7.640.000		33,33	
													32,65	
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah		Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14		89,14	8.140.263.807		8.140.263.807		418.299.958		5,14	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81.63	14.665.159.820	80.40	7842349830		7842349830		314.681.489		4,01	Dinas Perhubungan
		Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100		98.59								
		Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40		35								
		Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58		49.39								
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Trayek tersedianya angkutan subsidi	Trayek	8		5	-		-		-			
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek tersedianya angkutan subsidi	Trayek	8		2	-		-		-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Kab/ Kota terkendalinya angkutan umum Disabilitas	Kab/ Kota	10		2								
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	542		350	149.619.058		149.619.058		76.359.279		51,04	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	542		350	149.619.058		149.619.058		76.359.279		51,04	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen evaluasi Angkutan Umum Orang	Dokumen				Rp -		Rp -					
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendaraan	881		156	75.163.900		75.163.900		33.245.038		44,23	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Dokumen	881		156	75.163.900		75.163.900		33.245.038		44,23	
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis	3		1	6.872.004.000		6.872.004.000		39.458.100		0,57	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Fasilitas yang terpasang	Jenis	2		1	6.872.004.000		6.872.004.000		39.458.100		0,57	
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Fasilitas yang terpasang	Dokumen	19		5	35.800.624		35.800.624		14.225.000		39,73	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal	Dokumen	3		0	-		-		-			
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dokumen	12		3	-		-		-			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas terminal type B yang terpelihara	Paket	3		0	35.800.624		35.800.624		14.225.000		39,73	
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Dokumen manajemen rekayasa lalu lintas dan pelanggaran angkutan	Dokumen	60		20	684.490.348		684.490.348		148.403.572		21,68	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen MRLL dan DRK	Dokumen	56		18	-		-		-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi	Jumlah Dokumen kasus pelanggaran angkutan umum berkurang	Dokumen	4		2	429.627.348		429.627.348		121.134.512		28,20	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk						254.863.000		254.863.000		27.269.060			
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	Unit	90		66	25.271.900		25.271.900		2.990.500		11,83	
		Jumlah UPUBKB yang terbina	Unit	9		9								
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor Yang Dibina	Unit	9		6	25.271.900		25.271.900		2.990.500		11,83	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah kendaraan Angkutan Umum yang laik jalan	Unit Kendaraan	90		66								
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66,06	2.260.753.150	61.61	297.913.977		297.913.977		103.618.469		34,78	Dinas Perhubungan
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	40		35								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	40		35								
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25		21								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25		21								
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen	122		110	59.217.907		59.217.907		22.251.207		37,58	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen	122		110	59.217.907		59.217.907		22.251.207		37,58	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah data pelabuhan	Dokumen	3		1	158.570.758		158.570.758		66.322.262		41,83	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah data pelabuhan	Dokumen	3		1	158.570.758		158.570.758		66.322.262		41,83	
Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22		22	80125311,9		80125311,9		15.045.000		18,78	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22		22	80125311,9		80125311,9		15.045.000		18,78	
												28,99		
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi														
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Point											
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Opini BPK	Status	WTP		WTP	1.129.533.684.675,100	WTP	1.129.533.684.675,100		341.365.149.174		30,22	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	2.275.817.467.798,74	100	1.123.639.691.890	100	1.123.639.691.890		339.645.639.319		30,23	BPKAD
		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100		100								
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	Dokumen	1	2.416.003.767	1	2.971.731.796	6	2.971.731.796		880.649.794		29,63	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen	1	103.582.028	1	63.892.000	1	63.892.000		-		-	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen	1	108.390.241	1	96.290.600	1	96.290.600		-		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen	136	111.695.293	136	23.062.757	136	23.062.757		-		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen	136	121.488.403	136	29.034.064	136	29.034.064		-		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen	268	67.571.827	268	7.254.910	268	7.254.910		7.254.910		100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen	136	37.084.236	136	4.348.020	136	4.348.020		-		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	1.084.814.840	2	442.183.700	2	442.183.700		37.500.000		8,48	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Perubahan Penjabaran APBD	Dokumen	2	346.406.048	2	519.050.300	2	519.050.300		235.222.000		45,32	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang Tersusun	Regulasi	1	103.855.815	1	1.694.369.400	1	1.694.369.400		600.672.884		35,45	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Rapat Terselenggara	Kegiatan	4	331.115.036	4	92.246.045	2	92.246.045		-		-	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen	31	1.181.608.107	31	855.128.300	31	855.128.300		243.180.700		28,44	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Dokumen	10	129.954.691	10	155.366.400,00	10	155.366.400,00		72.416.400		46,61	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota	Dokumen	10	221.651.109	10	154.416.500,00	10	154.416.500,00		-		-	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Dokumen	10	223.956.257	10	157.596.500,00	10	157.596.500,00		22.130.000		14,04	
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil asistensi	Dokumen	10	68.642.264	10	86.417.000,00	10	86.417.000,00		54.867.000		63,49	
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Keuangan yang terlaksana	Kali	1	216.298.222	1	121.400.200,00	1	121.400.200,00		-		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di	Kali	11	321.105.564	11	179.931.700,00	11	179.931.700,00		93.767.300		52,11	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Dokumen	12	1.082.652.109	12	716.368.810,90	12	716.368.810,90		327.671.700		45,74	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Persen	85	758.813.698	85	378.140.792,00	85	378.140.792,00		248.779.360		65,79	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Dokumen		636.639		1.500.879,40	1	1.500.879,40		-		-	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Dokumen	3.000	15.810.269	3000	101.616.000,00	3000	101.616.000,00		4.748.500		4,67	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Dokumen	136	5.032.801	136	13.370.650,00	136	13.370.650,00		-		-	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Dokumen	11	892.646	11	5.500.000,00	11	5.500.000,00		-		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		kali		9.195.035	10	32.173.777,60	10	32.173.777,60		-		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Dokumen	132	31.995.392	132		132						
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Dokumen	3	217.372.721		14.100.441,10	3	14.100.441,10		1.040.000		7,38	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait		Dokumen	3	25.276.586	3	59.715.000,00	3	59.715.000,00		50.270.000		84,18	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Dokumen	1	17.626.323	1	101.750.655,40	1	101.750.655,40		22.833.840		22,44	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun tepat	Dokumen	12	2.688.788.091,44	4	1.501.480.969,60		1.501.480.969,60		279.959.065		18,65	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Dokumen	6	338.652.174,39									
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen BA Rekonsiliasi	Dokumen	1	160.608.873,47	1	160.572.300,00	1	160.572.300,00		43.730.200		27,23	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan , Triwulan , Semesteran	Dokumen	17	59.956.019,56	17	77.954.100,00	17	77.954.100,00		1.501.307		1,93	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di Konsolidasikan	Dokumen	136	228.996.840,91	136	764.474.400,00	136	764.474.400,00		234.727.558		30,70	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tetang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Dokumen	2	229.426.315,48	2	344.089.000,00	2	344.089.000,00		-		-	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Dokumen	3	74.315.643,52	1	-		-		-		-	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Regulasi terkait Juknit Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	43.174.143,94	1	47.050.857,50	2	47.050.857,50		-		-	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengeluaran Pembiayaan	Dokumen	1	27.826.982,54	1	49.269.843,40	1	49.269.843,40		-		-	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang	Dokumen	20	39.929.186,62	20	58.070.468,70	1	58.070.468,70		-		-	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan daeri BLUD Provinsi		60	96.487.718,11	20	-		-		-		-	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Dokumen	1	880.447.395.195,38	1	1.117.036.506.813	4	1.117.036.506.813		337.795.122.960		30,24	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah dokumen laporan penggunaan dana darurat dan mendesak	dokumen	35	415.422.681,66	35	40.321.837.234	35	40.321.837.234		-		-	
	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	dokumen		11.601.150.044,74		19.358.108.300	1	19.358.108.300		-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	dokumen		60.807.702.732,00		50.024.861.279	1	50.024.861.279		159.740.173		0,32	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	dokumen		807.623.119.736,98		1.007.331.700.000	1	1.007.331.700.000		337.635.382.787		33,52	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan yang tersusun	Dokumen	3	298.284.245,50	3	558.475.200	2	558.475.200		119.055.100		21,32	
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	3	66.658.467,98	3	111.397.900,00	2	111.397.900,00		34.268.000		30,76	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah pemeliharaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah	Kali	2	132.202.761,52	2	174.235.500,00	2	174.235.500,00		41.407.900		23,77	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah pembinaan SIPD Bidang Keuangan Daerah yang dilaksanakan	kali	3	99.423.016,00	4	272.841.800,00	31	272.841.800,00		43.379.200		15,90	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	75	5.688.570.834	70	3.956.162.693	70	3.956.162.693		774.995.035		19,59	BPKAD
Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD Perangkat yang tersusun	laporan	59	1.708.260.527,66	59	3.956.162.693	31	3.956.162.693		774.995.035		19,59	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	Dokumen	1	38.161.983,07	1	114.269.773	1	114.269.773		7.981.700		6,98	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	42.785.041,36	2	30.414.375	2	30.414.375		9.000.000		29,59	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	125.034.874,95	1	70.818.645	1	70.818.645		1.100.645		1,55	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	27.913.527,12	3	34.835.710	3	34.835.710		-		-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD	Dokumen	160	566.211.529,66	160	517.677.108	160	517.677.108		159.677.108		30,84	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Inventarisasi yang dilaksanakan	kegiatan	12	62.102.116,30	12	397.366.200	12	397.366.200		-		-	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah penanganan sengketa aset daerah	Kegiatan	5	432.134.022,29	5	824.450.535	5	824.450.535		93.099.405		11,29	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen	5	56.549.805,89	5	51.100.160	1	51.100.160		-		-	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Status Aset	laporan	1	58.742.423,25	1	54.000.795	5	54.000.795		-		-	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK Penetapan Penggunaan BMD, dan Penghapusan BMD,	surat keputusan, dokumen	10	74.757.810,90	10	1.710.548.078	34	1.710.548.078		472.378.002		27,62	
		Jumlah Persetujuan Gubernur Pemindahtanganan	Dokumen	36		12								
		Jumlah SK Penghapusan BMD	Dokumen	36		12								
		Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan secara optimal	Dokumen	1449	975.587.938,78	474								
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	Dokumen	132	113.375.719,60	132	52.921.999,80	132	52.921.999,80		27.860.150		52,64	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Dokumen	48	85.923.917,81	48	42.458.525,00	48	42.458.525,00		-		-	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan ke Kabupaten/Kota	Dokumen	10	24.567.755,46	10	55.300.789,80	10	55.300.789,80		3.898.026		7,05	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	3.807.331.659	85	1.431.027.493		1.431.027.493		698.230.545		48,79	INSPEKTORAT
		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48,89		44,44								
Penyelenggaraan Pengawasan Internal				148	2.399.067.769	72	1.301.026.437		1.301.026.437		673.830.545		51,79	
	a. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Melakukan Audit Kinerja, Probhity Audit, Money Dana Desa dan BOS Pendidikan Menengah, serta Pemantauan Bansos/ Hibah)			88	1.500.347.625		831.022.400		831.022.400		525.950.545		63,29	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						40.000.678		40.000.678		-			
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						831.022.400		831.022.400		525.950.545			
	Reviu Laporan Kinerja						50.000.471		50.000.471		18.900.000			
	b. Reviu Laporan Keuangan (Melakukan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ serta Reviu HPS)			6	157.566.277	36	85.000.620		85.000.620		22.545.000		26,52	
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota						870		870		-			
	c. Kerjasama Pengawasan Internal (Joint Audit)			13	539.076.821		150.000.870		150.000.870		49.490.000		32,99	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			1	202.077.047	16	145.000.528		145.000.528		56.945.000		39,27	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				17	432.386.126	25	130.001.056		130.001.056		24.400.000		18,77	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						45.000.528		45.000.528		4.440.000			
	Pengawasan Dengan Tujuan tertentu (Pemeriksaan Tujuan Tertentu/Khusus, Audit Investigasi, Audit PKN, dan Audit Dana BOS Pendidikan Menengah)			17	432.386.126	4	85.000.528		85.000.528		19.960.000		23,48	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi	%	70	225.468.766	6,55	506.802.600		506.802.600		246.284.275		48,60	INSPEKTORAT
Kegiatan 1 : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				10	225.468.766	16	30.000.585		30.000.585		19.080.000		63,60	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			10	225.468.766	3	0		0		-			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			100	22.185.177.455	13	30.000.585		30.000.585		19.080.000		63,60	
Kegiatan 2 : Pendampingan dan Asistansi				33	5.541.790.927	11	476.802.015		476.802.015		227.204.275		47,65	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub Kegiatan : Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						250.000.585		250.000.585		118.291.810		47,32	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						10.000.835		10.000.835		-		-	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			33	5.541.790.927	11	206.800.010		206.800.010		108.912.465		52,67	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						10.000.585		10.000.585		-		-	
													23,07	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65		38,65	1.130.460.974.532	38,65	1.130.460.974.532		341.574.406.140		30,22	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38,44	1.667.730.000	36,76	1.123.639.691.890		1.123.639.691.890		339.645.639.319		30,23	Bappenda
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%			1,35	2.971.731.796		2.971.731.796		880.649.794		29,63	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah (Dokumen)	Dokumen			2.571,64	63.892.000		63.892.000		-		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						96.290.600		96.290.600		-		-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD						23.062.757		23.062.757		-		-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD						29.034.064		29.034.064		-		-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD						7.254.910		7.254.910		7.254.910		100,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD						4.348.020		4.348.020		-		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						442.183.700		442.183.700		37.500.000		8,48	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						519.050.300		519.050.300		235.222.000		45,32	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						1.694.369.400		1.694.369.400		600.672.884		35,45	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah (Dokumen)	Dokumen			2.571,64								
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						-		-		-		-	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						-		-		-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi						92.246.045		92.246.045		-			
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota							855.128.300		855.128.300		243.180.700			
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						155.366.400		155.366.400		72.416.400			
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota						154.416.500		154.416.500		-			
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						157.596.500		157.596.500		22.130.000			
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						86.417.000		86.417.000		54.867.000			
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah						121.400.200		121.400.200		-			
	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						-		-		-			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah						179.931.700		179.931.700		93.767.300			
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Persen			52,22	716.368.811		716.368.811		327.671.700		45,74	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						378.140.792		378.140.792		248.779.360			
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						1.500.879		1.500.879		-			
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						101.616.000		101.616.000		4.748.500			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rp			2.819,43	13.370.650			13.370.650				
		Jumlah Penerimaan dana Transfer Lainnya	Milyar Rp			8,01								
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						5.500.000			5.500.000				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						32.173.778			32.173.778				
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						14.100.441			14.100.441		1.040.000		
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SPD dengan Instansi Terkait						59.715.000			59.715.000		50.270.000		
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						101.750.655			101.750.655		22.833.840		
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						8.500.615			8.500.615		-		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							1.501.480.970			1.501.480.970		279.959.065		
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						-			-		-		
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						160.572.300			160.572.300		43.730.200		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						77.954.100		77.954.100		1.501.307			
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						764.474.400		764.474.400		234.727.558			
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi						344.089.000		344.089.000		-			
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						-		-		-			
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						47.050.858		47.050.858		-			
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						49.269.843		49.269.843		-			
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi						58.070.469		58.070.469		-			
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi						-		-		-			
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							1.117.036.506.813		1.117.036.506.813		337.795.122.960			
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						40.321.837.234		40.321.837.234		-			
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						19.358.108.300		19.358.108.300		-			
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						50.024.861.279		50.024.861.279		159.740.173			
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi						1.007.331.700.000		1.007.331.700.000		337.635.382.787			
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							558.475.200		558.475.200		119.055.100			
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah						111.397.900		111.397.900		34.268.000			
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						174.235.500		174.235.500		41.407.900			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi						272.841.800		272.841.800		43.379.200			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	54,03	46.183.810.000	52,03	6.821.282.643		6.821.282.643		1.928.766.821		28,28	Bappenda
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%			31,66	6.821.282.643		6.821.282.643		1.928.766.821		28,28	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Target pendapatan pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rp			1.726,24	330.300.000		330.300.000		78.914.700		23,89	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Perjanjian Kerjasama (PKS) pengembangan layanan kesamsatan yang ditindaklanjuti	MoU			5	181.900.110		181.900.110		22.262.372		12,24	
		Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya	Draft			63,64								
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perorangan dan badan	Persen			98,75	265.800.765		265.800.765		61.942.800		23,30	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tingkat gangguan perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi yang direduksi	Persen			914.382	796.850.730		796.850.730		180.143.494		22,61	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data Obyek Pajak Daerah (DU & TMDU PKB) yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek			1.700.000	529.800.000		529.800.000		129.968.580		24,53	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah record data yang disinkronkan dalam database	Obyek			98.581	172.400.275		172.400.275		-		-	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	Obyek			64,20	1.803.445.080		1.803.445.080		487.050.080		27,01	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Angka partisipasi Wajib Pajak yang menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotornya	Persen			178.229	187.501.482		187.501.482		164.051.170		87,49	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Dokumen)	Dokumen			1.650	21.250.000		21.250.000		-		-	
		Jumlah WP Penunggak Pajak yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek			1.650								
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP penerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) yang menyelesaikan kewajiban PKBnya	Obyek			64.200	546.513.366		546.513.366		135.198.825		24,74	
		Jumlah WP penerima Surat Teguran PKB dan Penagihan Pajak Daerah yang melunasi tunggakan PKBnya	Obyek			3								
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	Kasus			27.169	1.500.055		1.500.055		-		-	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	WP Terjaring Operasi Sadar PKB yang menyelesaikan kewajiban/ tunggakan PKBnya	Obyek			490,10	1.782.620.000		1.782.620.000		647.884.800		36,34	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah penerimaan Dana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, dan penerimaan Pendapatan Lain-lain	Milyar Rp				201.400.780		201.400.780		21.350.000		10,60	
													25,34	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)		A (80,01 - 90,00)	11.514.506.543	A (80,01 - 90,00)	11.514.506.543		2.731.917.059		23,73	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	14.444.339.884	100	1.999.682.300		1.999.682.300		230.602.914		11,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan & pendanaan pembangunan daerah	Dokumen			10	1.362.671.800		1.362.671.800		157.815.315		11,58	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	dokumen			3	31.225.150		31.225.150		8.500.955		27,22	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	dokumen			2	139.700.200		139.700.200		23.900.000		17,11	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara			1	67.500.100		67.500.100		57.900.000		85,78	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara			1	129.550.250		129.550.250		61.400.000		47,39	
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang	Berita Acara			1	829.608.300		829.608.300		-		-	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen			2	165.087.800		165.087.800		6.114.360		3,70	
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Hasil Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen			5	478.210.000		478.210.000		70.287.349		14,70	
	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dok			3	130.220.000		130.220.000		-		-	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Dok			50	182.740.000		182.740.000		24.160.239		13,22	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	laporan			400	165.250.000		165.250.000		46.127.110		27,91	
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen			19	158.800.500		158.800.500		2.500.250		1,57	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan			2	20.700.000		20.700.000		-		-	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	kerja sama			1	14.700.150		14.700.150		-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan			14	107.800.250		107.800.250		2.500.150		2,32	
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	dokumen			2	15.600.100		15.600.100		100		0,00	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	37.833.084.161	100	8.201.319.950		8.201.319.950		1.895.322.710		23,11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen			3	1.600.702.300		1.600.702.300		367.686.958		22,97	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			2	21.471.400		21.471.400		4.000.000		18,63	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan			2	10.000.000		10.000.000		2.500.000		25,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan			2	85.000.000		85.000.000		9.910.000		11,66	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan			1	14.800.000		14.800.000		-		-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			4	168.036.900		168.036.900		4.500.000		2,68	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan			4	35.700.000		35.700.000		2.750.000		7,70	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan			4	95.000.000		95.000.000		9.686.958		10,20	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	dokumen			2	1.170.694.000		1.170.694.000		334.340.000		28,56	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen			3	5.853.498.550		5.853.498.550		1.407.914.932		24,05	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			5	43.565.000		43.565.000		4.580.000		10,51	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan			4	42.220.300		42.220.300		-		-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan			4	291.723.150		291.723.150		24.588.600		8,43	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan			3	1.126.968.900		1.126.968.900		119.910.000		10,64	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			2	23.550.200		23.550.200		-		-	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan			2	10.000.000		10.000.000		7.020.000		70,20	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan			2	1.833.088.000		1.833.088.000		540.058.660		29,46	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	laporan			2	2.482.383.000		2.482.383.000		711.757.672		28,67	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen			3	747.119.100		747.119.100		119.720.820		16,02	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			4	27.250.400		27.250.400		6.200.750		22,75	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan			4	6.500.100		6.500.100		-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub Kegiatan 3 : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas			1	95.465.459	2								
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%	100	2.486.608.796	100	756.213.180	100	756.213.180		311.231.989		41,16	Biro Organisasi
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Perangkat Daerah yang telah menindaklanjuti hasil evaluasi penyederhanaan struktur organisasi, hasil evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	100	1.355.820.752	100	756.213.180	100	756.213.180		311.231.989		41,16	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan, Jumlah dokumen UPTD /UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi	Dokumen	6	585.175.408	6	281.663.945	6	281.663.945		139.792.652		49,63	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten /Kota yang terfasilitasi	Dokumen	22	282.231.024	22	118.466.670	22	118.466.670		52.819.615		44,59	
	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban erja yang tersusun, Jumlah Dokumen Jabatan Struktural yang tersusun	Dokumen	3, 43	488.414.320	3, 43	43.761.475	3,43	43.761.475		22.606.075		51,66	
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SAKIP sesuai Peraturan Perundang-Undangan	%	100	2.486.608.796	100	119.435.800	100	119.435.800		64.366.962		53,89	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan PMPRB Kab/Kota, Laporan PMPRB Provinsi	Laporan	22	642.679.825	22	474.549.235	22	474.549.235		171.439.338		36,13	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, Jumlah Laporan SAKIP Perangkat Daerah yang baik	Dokumen, Laporan	43, 43	614.220.839	43, 43	67.777.860	43, 43	67.777.860		36.471.416		53,81	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan fasilitasi dan evaluasi perangkat daerah/unit kerja penerapan budaya kerja	Laporan	1	267.573.765	1	173.485.800	1	173.485.800		37.795.800		21,79	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP tata kelola pemerintahan	OPD	43	243.208.989	43	39.250.037	43	39.250.037		6.481.137		16,51	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen IKU, PK, RA, RKT, Laporan Capaian PK/RA, LKJIP	Dokumen	48	718.925.378	48	103.761.475	48	103.761.475		43.910.222		42,32	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	persen	100	9.485.035.504	100	557.291.113	100	557.291.113		294.759.446		52,89	Biro Pemerintahan
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan	dok	9	2.778.249.878	3	132.612.536	3	132.612.536		59.691.145		45,01	
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	dok	3	794.553.356	1	8.530.871	1	8.530.871		5.861.500		68,71	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	dok	3	720.804.546	1	49.980.766	1	49.980.766		23.006.665		46,03	
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	dok	3	1.262.891.976	1	74.100.900	1	74.100.900		30.822.980		41,60	
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	dok	12	4.928.610.306	4	303.709.779	4	303.709.779		201.073.124		66,21	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	dok	3	1.933.929.071	1	79.166.955	1	79.166.955		41.059.881		51,86	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	dok	3	652.721.357	1	50.065.275	1	50.065.275		25.087.875		50,11	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	dok	6	2.341.959.878	2	174.477.549	2	174.477.549		134.925.368		77,33	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah	dok	3	1.778.175.320	1	120.968.798	1	120.968.798		33.995.177		28,10	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	kerjasama	40	763.762.649	10	64.550.450	10	64.550.450		27.536.854		42,66	
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	kerjasama	40	473.361.562	10	31.960.040	10	31.960.040		2.500.980		7,83	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	kerjasama	40	541.051.109	10	24.458.308	10	24.458.308		3.957.343		16,18	
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN		Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72		0,72	5.715.433.455	0,72	5.715.433.455		874.029.383	#DIV/0!	25,61	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Nilai Penerapan Sistem Merit	point	373	7.425.595.246	347,5	1.400.436.590	1.400.436.590			452.541.594		32,31	BKD
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informas	point	102	2.947.141.919,00	115	495.855.000,00		495.855.000,00		176.581.000		35,61	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/P3K terseleksi	orang	1200	1.904.365.497,00	400	283.105.000,00		283.105.000,00		143.211.000		50,59	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT	SK	735	264.809.478,00	245	31.080.000,00		31.080.000,00		9.150.000		29,44	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Fasilitasi KORPRI	Kegiatan	12	-	4	62.550.000		62.550.000		3.000.000		4,80	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU	Pgawai	14143	777.966.944,00	14143	119.120.000,00		119.120.000,00		21.220.000		17,81	
Mutasi dan Promosi ASN		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Point	32,5	3.492.141.693,00	31,5	446.070.000,00		446.070.000,00		146.133.184		32,76	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	SK	690	365.757.991,00	230	69.110.000		69.110.000		27.001.392		39,07	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala	SK	9000	1.037.953.669,00	3000	108.500.000,00		108.500.000,00		20.351.000		18,76	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jab. Struktural	SK	990	2.088.430.033,00	330	268.460.000,00		268.460.000,00		98.780.792		36,80	
Pengembangan Kompetensi ASN		Nilai Aspek Pengembangan karir, Perindugan dan pelayanan	point	118,5	479.038.537,00	82,5	272.660.600,00		272.660.600,00		77.004.910		28,24	
	Pengelolaan Assessment Center						130.800.000,00		130.800.000,00		29.503.710			
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah SPT, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Mengikuti Diklat dan Sertifikasi	pegawai	300	16.465.825,00	100	34.500.300,00		34.500.300,00		10.250.000		29,71	
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jafung dan Uji Kompetensi	orang	60	92.884.590,00	20	27.600.300,00		27.600.300,00		10.450.000		37,86	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional	Kegiatan	3	47.781.226,00	1								
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional	SK	1320	200.189.778,00	440	79.760.000,00		79.760.000,00		26.801.200		33,60	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK	DUPAK/PAK	120	121.717.118,00	40								
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	point	120	507.273.097,00	117,5	185.850.990,00		185.850.990,00		52.822.500		28,42	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						91.500.000,00		91.500.000,00		24.875.000			
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur	Dokumen	12	166.530.163,00	12								
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan Pegawai teladan	Orang	72	97.070.376,00	24	27.600.990,00		27.600.990,00		7.275.000		26,36	
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN	OPD	46	243.672.558,00	46	66.750.000,00		66.750.000,00		20.672.500		30,97	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,10	51.655.240.040	0,10	4.314.996.865	0,10	4.314.996.865		421.487.789		9,77	Badan Pengembang

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,04		0,04		0,04						an Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,15		0,15		0,15						
		Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0,62		0,62		0,62						
Pengembangan Kompetensi Tekhnis		Jumlah Kompetensi Tekhnis ASN	orang	630	3.017.260.627	170	448.062.387	170	448.062.387		95.218.303		21,25	
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	dok	9		3		3						
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dok	3	248.451.557	1	91.566.800	1	91.566.800		26.572.301		29,02	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dok	3	188.076.443	1	31.994.300	1	31.994.300		9.941.816		31,07	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	630	2.178.461.048	170	300.911.475	170	300.911.475		50.445.000		16,76	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	dok	3	402.271.578	1	23.589.812	1	23.589.812		8.259.186		35,01	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	orang	3,464	48.637.979.414	145	3.866.934.478	145	3.866.934.478		326.269.486		8,44	
		Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	orang	560		60		60						
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN	dok	72		24		24						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	dok	3										
					132.057.743	1	23.606.395	1	23.606.395					
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	dok	6	392.098.238	2	59.170.400	2	59.170.400		10.812.177		18,27	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	orang	560	671.037.778	60	131.916.100	60	131.916.100		28.829.359		21,85	
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	laporan	9	1.542.322.946	3	458.919.500	3	458.919.500		164.558.663		35,86	
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	dok	30	164.865.900	10	81.400.000	10	81.400.000		29.621.371		36,39	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	dok	12	188.076.443	4	24.413.587	4	24.413.587					
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	orang	3.864	45.427.613.780	145	2.987.508.496	145	2.987.508.496		54.205.780		1,81	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	dok	12	119.906.585	4	100.000.000	4	100.000.000		38.242.136		38,24	
													25,31	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Sasaran 5: Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55		4,55	12.577.307.987	4,55	12.577.307.987		3.894.956.653		30,97	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,90		98,90	119.280.827	98,90	119.280.827		49.489.700		41,49	DPMDes Dukcapil
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Persentase penyelenggaraan pendaftaran kependudukan	%	100	110.660.111	100	119.280.827	100	119.280.827		49.489.700		41,49	
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk		Kali	33	82.164.000	33	88.000.827	33	88.000.827		29.700.000			
	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Berat Dokumen/barang yang dikirim	Kg	500	28.496.111	500	31.280.000	782	31.280.000		19.789.700		63,27	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	85.820.600	100	92.000.827	100	92.000.827		21.120.380		22,96	DPMDes Dukcapil
Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Jenis Dokumen Catatan Sipil dan pendukungnya	Dokumen	1	85.820.600	1	92.000.827	1	92.000.827		21.120.380		22,96	
	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	jumlah peserta Rakor di bidang pencatatan sipi	Orang	40	85.820.600	40	92.000.827	40	92.000.827		21.120.380		22,96	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase pengelolaan informasi data administrasi kependudukan yang baik di tingkat kab/kota	%	100	182.010.364	100	155.502.085	100	155.502.085		14.900.380		9,58	DPMDes Dukcapil
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	kali	4	182.010.364	4	80.501.258	4	80.501.258		-		-	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Berat Dokumen/Barang yang dikirim	Kg	1.250	12.562.083	1250	78.000.000	1250	78.000.000		-		-	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis	3	169.448.281	3		3						
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						2.501.258		2.501.258		-			
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	100	195.198.365	100	75.000.827	100	75.000.827		14.900.380		19,87	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Frekuensi perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tahun	1	195.198.365	1	75.000.827	1	75.000.827		14.900.380		19,87	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran dan pesisir	%	25	119.143.303	20	195.204.800	20	195.204.800		32.019.635		16,40	DPMDes Dukcapil
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kali	3	119.143.303	3	195.204.800	3	195.204.800		32.019.635		16,40	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	FGD Pengembangan Kerjasama Potensi Unggulan Desa	Kabupaten	4	31.689.519	4	52.477.525	4	52.477.525		-			
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	BIMTEK Kerjasama Desa Provinsi NTB	Orang	40	31.689.519	40	42.977.025	40	42.977.025		10.098.435		23,50	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	FGD Pengembangan Kawasan Perdesaan	Kabupaten	4	55.764.265	4	99.750.250	4	99.750.250		21.921.200		21,98	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik Sesuai Standart KIP (%)	%	80	16.947.033.421	70	7.439.403.380		7.439.403.380		2.652.189.154		35,65	Diskominfotik
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik (%)	%	85	6.702.957.548	80	7.439.403.380		7.439.403.380		2.652.189.154		35,65	
	Monitoring Opini dan opini Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Opini dan Aspirasi	Dokumen	2	361.052.338	2	245.547.391		245.547.391		77.469.784		31,55	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik	Informasi	806	1.587.444.652	701	2.888.558.035		2.888.558.035		792.450.495		27,43	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh perangkat Daerah	Informasi	690	114.738.050	690	158.010.057		158.010.057		42.756.900			
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Lembaga dan Pers yang Terlibat dalam penyebaran Informasi	Lembaga	5	36.081.131	5	12.000.000		12.000.000		6.500.000			
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang Terlatih dan terfasilitasi	Orang	40	109.720.279	40	-		-		-			
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan	Kasus	2	1.551.207.649	4	1.267.787.783		1.267.787.783		533.011.975		42,04	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitaan Komunitas	Jumlah Kelompok/Komunitas yang diberdayakan dalam Penyebarluasan Informasi	Komunitas	15	2.509.787.788	15	2.780.000.114		2.780.000.114		1.200.000.000		43,17	
	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	Unit	10	432.925.661	10	87.500.000		87.500.000		-			
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Berbasis TIK	%	65	6.229.379.686	55	2.400.209.950		2.400.209.950		400.877.163		16,70	Diskominfotik
Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Kualifikasi/Level Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Kualifikasi/Level)	%	Terintegrasi	2.463.868.840	Terstandarisasi	2.400.209.950		2.400.209.950		400.877.163		16,70	
	Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-Government	Dokumen	2	634.750.115	2	155.570.150		155.570.150		53.289.516		34,25	
	Pengelolaan Pusat DataPemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data	OPD	46	1.185.635.464	43	2.050.039.800		2.050.039.800		347.587.647		16,96	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Simpul Jaringan Perangkat Daerah yang Terkoneksi	OPD	30	539.633.718	23	129.600.000		129.600.000		-		-	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Oemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Aplikasi	3	103.849.543	2	65.000.000		65.000.000		-			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	1.530.744.809	25	197.380.422		197.380.422		52.451.994		26,57	Diskominfotik
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase Data yang Tervalidasi	%	65	605.446.229	50	197.380.422		197.380.422		52.451.994		26,57	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Penolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data yang tervalidasi	Jenis	550	54.019.082	530	39.715.300		39.715.300		12.100.844		30,47	
	Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang Meningkatkan Pemahaman	Orang	55	377.189.970	55	28.036.300		28.036.300		6.550.350		23,36	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata yang terbangun	Jenis	20	26.548.709	15	31.394.100		31.394.100		8.000.300		25,48	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam Penyusunan	OPD	46	31.506.296	46	27.237.522		27.237.522		-		-	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi Statistik	OPD	7	116.182.172	6	70.997.200		70.997.200		25.800.500		36,34	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50	1.492.430.577	40	175.819.782		175.819.782		24.705.000		14,05	Diskominfo
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%	50	387.276.530	40	86.319.702		86.319.702		2.735.000		3,17	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Dokumen	1	47.577.621	1	55.500.500		55.500.500		-		-	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber	Orang	6	219.127.137	6	8.618.600		8.618.600		2.735.000		31,73	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	Insiden	14	93.443.123	16	2.000.302		2.000.302		-		-	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	OPD	46	27.128.649	30	20.200.300		20.200.300		-		-	
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi		Persentase Pemanfaatan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah (%)	%	100	105.862.015	65	89.500.080		89.500.080		21.970.000		24,55	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan komunikasi sandi	OPD	46	105.862.015	65	89.500.080		89.500.080		21.970.000		24,55	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	300.351.716	90	115.431.602	100	70.375.600		18.837.600		26,77	Dsinakertran
Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	Dokumen	2	300.351.716	2	115.431.602	1	70.375.600		18.837.600		26,77	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan	Dokumen	1	244.705.400	1	85.000.000	1	70.375.600		18.837.600		26,77	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang di hasilkan	Dokumen	1	55.646.316	1	30.431.602	0	-		-		-	
		Persentase Penyerapan Angkatan Kerja	%	96,83		96,81								
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	1.293.706.035	100	956.313.361		956.313.361		109.052.036		11,40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	12	100.211.738		164.630.000		164.630.000		27.440.000		16,67	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kejadiannya	Orang	2	-									
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100	100	237.167.713	100	44944182,2		44944182,2		1.653.076		3,68	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam	Eksemplar	550	64.936.077		8.301.864		8.301.864		1.132		0,01	
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	550	64.936.077		8.301.864		8.301.864		1.132		0,01	
	Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	-	-	-		0		0		-			
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah		Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi	Eksemplar	600	85.225.042		18.304.464		18.304.464		1.060		0,01	
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	600	48.192.201		10.003.049		10.003.049		445		0,00	
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	10	37.032.840		8.301.415		8.301.415		615		0,01	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	Eksemplar	10	87.006.593		18.337.855		18.337.855		1.650.885		9,00	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	10	38.929.620		7.001.061		7.001.061		468		0,01	
	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	10	48.076.972		11.336.794		11.336.794		1.650.417		14,56	
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Daerah Provinsi yang Tersedia	-	-	-		0		0		-			
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	-	-	-		0		0		-			
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	-	-	-		0		0		-			
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang	43.000	-	41.000	730.872.770		730.872.770		517.660.536		70,83	Badan Penghubung Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			Event				730.872.770		730.872.770		517.660.536		70,83	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya					210.000.000			210.000.000		175.000.000		83,33	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					520.872.770			520.872.770		342.660.536		65,79	
														21,38	
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah															
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing															
Sasaran 1: Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat															
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kesehatan	Point												
		Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48		67,48	-	67,48	171.637.412.897		46.290.640.994		26,97		
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	85	490.192.636.948	85	168.982.633.871	168.982.633.871		46.233.344.723		27,36	Dinas Kesehatan		
		Persentase balita Wasting	%	85		11,41									
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	80		97									
		Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%	100		75									
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB (%)	%	100		100									
		Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80 %	%	100		90									
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		100									
		Persentase Penyelesaian Data dan Informasi Kesehatan Daerah	%	3	3.651.104.864	100									
		Persentase Puskesmas Yang di Bina Mampu melaksanakan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA, PKPR, PKRET, Lansia) sesuai Standar	%	92,9	-	87									
		Persentase Kabupate n/ Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	%	40	-	30									
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	%	100	-	100									
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100	-	100									
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar (Persen)	%	4	4.187.371.186	80	71.802.524.031	71.802.524.031		3.913.931.218		5,45			
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah lokal Pengembangan Rumah Sakit	Lokal	3	3.600.000.000		2049435601	2049435601		1.000.000		0,05			
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi yang di distribusikan ke Kab / Kota	Jenis	120	95.840.033		463294000	463294000		182.574.742		39,41			
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis Obat dan perbekalan kesehatan buffer stock provinsi yang diadakan	Jenis	20	491.531.153		14694693020	14694693020		320.987.780		2,18			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan, pendampingan dan Monev / investigasi kegiatan UKP Rujukan,UKM danUKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab/Kota	10	75.626.672.761	10	95951198152		95951198152		42.162.799.879		43,94	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	27707	258.312.957	27707	6598718500		6598718500		322.912.020		4,89	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Orang	4200	218.638.724	4200	1955100214		1955100214		237.287.760		12,14	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas	50	741.853.974	40	615000000		615000000		235.390.000		38,27	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan PKPR dan PKRET	Puskesmas	50	982.254.586	40	109501500		109501500				-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Santun Lansia	Puskesmas	40	1.187.775.766	35	187501500		187501500				-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Terstandar (kab/kota)	Kab/Kota	10	10.098.612.892	10	455531621,8		455531621,8		116.970.049		25,68	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Kab/Kota	4	612.401.193	3	320400000		320400000				-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KK Dengan Akses Jamban Sehat	%	97	3.956.744.171	94	8373275700		8373275700		59.874.080		0,72	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Posyandu yang diaktifkan	Posyandu	383	643.702.954	377	115000000		115000000				-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	Kab/Kota	10	912.043.506	9	741950225,9		741950225,9		135.795.000		18,30	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	4996	46.687.447	4996	50316100		50316100		5.795.000			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Puskesmas	171	242.040.536	151	382286667,1		382286667,1		39.680.400			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan NAPZA	Puskesmas	129	144.117.959	109	181490929,5		181490929,5		19.600.000			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Kelompok Penerima Hibah	Kelompok	11	3.501.558.504	11	5197680000		5197680000		342.251.975		6,58	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka program jaminan kesehatan nasional	Kab/Kota	10	46.614.847.827	10	68959093606		68959093606		40.436.559.212		58,64	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Analisis Faktor Resiko KLB yang dihasilkan	Analisis	10	248.408.703	10	317500000		317500000		8.220.000		2,59	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan SPM Kab/Kota	Dokumen	10	107.068.430	10	99400600		99400600				-	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	10	373.293.715	10	652362735,3		652362735,3		138.352.000		21,21	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	1	64.059.520	1	63126234,2		63126234,2					
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	investigasi	10	347.319.534	10	80000000		80000000					
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Layanan Rumah Sakit	Layanan	1	4.000.000.000	1	10000000		10000000					
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab./Kota yang mempunyai PSC	Kab/Kota	10	98.425.389	10	72000000		72000000		59.960.360		83,28	
	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah RS yang melaksanakan SISRUITE	RS	45	93.716.689	43	54500216,5		54500216,5					
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan/Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/nasional	Pengambilan	20	9.011.763	20 Kali	9712152		9712152		4.150.000			
	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Tim Gerak Cepat (TGC) yang dibina	Tim	10	123.776.022	10	349749650		349749650		2.023			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	409.886.957	1	387571089		387571089		37.746.820		9,74	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	370.687.096	1	370071089		370071089		37.746.820		10,20	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan (Paket)	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan (Paket)	Paket	1	39.199.861	1	17500000		17500000					
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit (RS)	RS	45	256.153.891	45	841340599		841340599		118.866.806		14,13	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit (RS)	RS	45	111.439.939	45	108401326,1		108401326,1		65.688.806		60,60	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL (Kab/Kota)	Kab/Kota	10	144.713.952	10	732939272,9		732939272,9		53.178.000		7,26	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	3.651.104.864	2,5	2.556.976.597		2.556.976.597		57.296.271		2,24	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah dokumen rencana pemenuhan minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas Provinsi NTB (dokumen)	Dokumen	11	199.772.218	11	88.404.441		88.404.441		18.751.271		21,21	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana pemenuhan minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas Provinsi NTB (dokumen)	Dokumen	11	49.337.098	11	29.403.481		29.403.481		3.751.271		12,76	
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana distribusi dan pemerataan minimal 9 Tenaga Kesehatan di Pusk Provinsi NTB (Dokumen)	Dokumen	11	150.435.120	11	59.000.960		59.000.960		15.000.000		25,42	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	Orang	500	1.191.609.218	500	2.468.572.156		2.468.572.156		38.545.000		1,56	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	Orang	500	1.072.747.376	500	2.377.071.676		2.377.071.676		4.105.000		0,17	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia (Dokumen)	Dokumen	1	118.861.842	1	91.500.480		91.500.480		34.440.000		37,64	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit													
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis		13	5.610.281.704	13								
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase masyarakat yang terlayani	%	100	1.259.522.597	100								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang terlayani		4363	161.031.598	540								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani		36020	292.606.158	35460								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani		350	114.887.422	310								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang terlayani		80	670.243.441	50								
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah orang yang terlayani		550	20.753.975	540								
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	465.001.430	80								
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi		2	465.001.430	2								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	80,00	144.479.341.067	78,00								Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia	unit	200	84.197.172.000	54								
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis obat dan BMHP yang tersedia	jenis	12	5.013.649.000	12								
	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah gedung yang terpelihara	unit	5	700.000.000	5								
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani	Orang	105	209.410.000	40								
													13,81	
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat		Persentase Balita Stunting	%	30,49		30,49		30,49						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase balita Wasting	%	10,41	-	11,41								Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas	%	80		70	262.714.863	262.714.863		51.930.000			19,77	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						5.319.371.000		5.319.371.000		165.163.000		3,10	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						576.363.000		576.363.000		327.928.000		56,90	
	Pembangunan Asrama Sekolah						997.568.000		997.568.000		113.447.000		11,37	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						13.701.119.250		13.701.119.250		1.560.605.000		11,39	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah						423.080.000		423.080.000		86.041.000		20,34	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						29.818.893.750		29.818.893.750		4.894.793.800		16,42	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						3.615.004.000		3.615.004.000		462.200.000		12,79	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi						1.759.241.000		1.759.241.000		524.067.000		29,79	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						1.488.625.000		1.488.625.000		280.445.000		18,84	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						450.711.000		450.711.000		213.977.000		47,48	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						509.773.000		509.773.000		84.720.000		16,62	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						690.884.000		690.884.000		129.399.000		18,73	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						522.239.000		522.239.000		214.022.000		40,98	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						1.448.824.000		1.448.824.000		386.663.000		26,69	
	Rehabilitasi Asrama Sekolah						852.243.000		852.243.000		783.663.000		91,95	
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
	Pengadaan Mebel Sekolah						3.933.236.000		3.933.236.000		2.082.523.000		52,95	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						4.766.250.000		4.766.250.000				-	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas													
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						1.640.643.950		1.640.643.950		55.334.550		3,37	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik													
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas													
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						7.202.543.000		7.202.543.000		9.780.000			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas													
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas													
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas													
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah							245.011.161.344		245.011.161.344		8.539.899.624		3,49
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa							14.142.776.164		14.142.776.164		3.669.222.901		25,94
	Pembangunan Ruang Laboratorium							36.201.499.539		36.201.499.539		3.058.806.700		8,45
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							4.044.718.000		4.044.718.000				
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							3.760.723.000		3.760.723.000		860		
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							1.287.237.000		1.287.237.000				
	Pengadaan Mebel Sekolah							4.700.931.496		4.700.931.496		452.180.791		9,62
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							5.125.000.000		5.125.000.000				-
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							1.600.000.000		1.600.000.000		19.101.415		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							37.734.697.000		37.734.697.000		229.968.205		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan													
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							540.985.307		540.985.307		537.660.800		99,39
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik													
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan							399.499.900		399.499.900		130.568.804		32,68
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							74.701.737		74.701.737				

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	831.855.187	35								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi														
	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi													
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Program 1: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1. Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%		100	100	3.925.610.669	3.925.610.669		791.868.336		20,17		Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Persentase pemuda peserta pelatihan yang bersertifikat	%		100	100								
Kegiatan 1 : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan KewenanganProvinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang		160	160	3.925.610.669	3.925.610.669		791.868.336		20,17		
	Sub kegiatan 1 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tk. Provinsi yang terseleksi	Orang		15	21	116.250.751	116.250.751		16.250.751		13,98		
	Sub kegiatan 4 : Koordinasi, Singkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Wirasaha Muda Provinsi	Jumlah Pemuda yang dilatih	orang		100	100	23.847.654	23.847.654		7.572.604		31,8		
	Sub kegiatan 2 : Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang		18	100	0	0		-				
	Sub kegiatan 3 :Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan	Unit		-	0	1.068.386.890	1.068.386.890		56.386.989		5,3		
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Pemuda yang dilatih	orang		100	100	2.610.000.000	2.610.000.000		700.000.000		26,8		
	Sub kegiatan 5 : Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda	Orang		60	20	107.125.375	107.125.375		11.657.994		10,88		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Program 2 : PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Alltlet Berprestasi	%		100	100	19.831.948.906	19.831.948.906		8.447.753.478		42,6		Dinas Pemuda dan Olahraga

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadikewenangan Daerah Provinsi		Presentase Sarana Prasarana Olahraga yang Terstandar	%		40	40	7.331.414.647		7.331.414.647		134.701.578		1,8	
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit		2	2	7.331.414.647		7.331.414.647		134.701.578		1,8	
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Medali Yang Diperoleh	Medali		40	40	2.273.007.798		2.273.007.798		-		-	
	Sub Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Event Pemassalan Olahraga	Event		5	5	1.253.803.198		1.253.803.198		-		-	
	Sub Kegiatan 2 : Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan SingleEvent	Jumlah Peserta Kejuaraan Tk. Nasional dan Internasional	Orang		150	26	1.019.204.600		1.019.204.600		-		-	
Kegiatan 3 : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah Cabor Yang Dibina	Cabor		3	3	397.526.461		397.526.461		13.051.900		3,28	
	Sub Kegiatan 1 : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlit yang Dibina	Orang		12	12	397.526.461		397.526.461		13.051.900		3,28	
Kegiatan 4 : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Dibina	Lembaga		10	3	9.830.000.000		9.830.000.000		8.300.000.000		84,4	
	Sub Kegiatan 1 : Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan Penerima yang Difasilitasi	Lembaga		10	3	9.830.000.000		9.830.000.000		8.300.000.000		84,4	
													22,89	
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan														
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan														
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point											
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air	Point		43,03	43,03	1.482.230.711		43,03	1.482.230.711		230.778.943		15,57
		Indeks Kualitas Udara	Point		87,59	87,59			87,59					
		Indeks Kualitas Air Laut	Point		87,66	87,66			87,66					
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	%		100	1.024.902.302,60	100,00	499.917.440		499.917.440		39.886.004		7,98
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	Dokumen		7	602.571.166,34	2	69.117.400		69.117.400		20.001.020		28,94
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	Dokumen		1	445.639.676,49	1	39.248.200		39.248.200		11.249.070		28,66
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun	Dokumen		6	156.931.489,85	2	29.869.200		29.869.200		8.751.950		29,30
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	Dokumen		29	422.331.136,26	7	430.800.040		430.800.040		19.884.984		4,62
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Kawasan Strategis dan dokumen KLHS kab/kota yang divalidasi	Dokumen		18	218.812.769,16	6	77.500.040		77.500.040		-		-
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun/divalidasi	Dokumen		24	133.665.362,66	8	1.600.000		1.600.000		-		-

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun/dilaksanakan	Dokumen	3	69.853.004,43	8	351.700.000		351.700.000		19.884.984		5,65	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengendalian pencemaran	%	100	2.835.284.286	100	605.207.126		605.207.126		133.373.195		22,04	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	2.181.040.532,41	10								
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	846	1.257.588.598,00	282	576.687.376		576.687.376		130.065.195		22,55	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	846	2.181.040.532,41	282	149.228.700		149.228.700		57.344.200		38,43	
		Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit usaha	30	437.488.380,00	30								
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelompok masyarakat yang memenuhi syarat program kampung iklim	kelompok	20	200.000.000,00	10	46.378.126		46.378.126		3.551.335		7,66	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan	parameter	25	1.859.729.564,48	10	381.080.550		381.080.550		69.169.660		18,15	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi	3,00	922.203.753,58	3	28.519.750		28.519.750		3.308.000		11,60	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah dokumen publikasi hasil pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara)	dokumen	3,00	454.243.753,58	1	28.519.750		28.519.750		3.308.000		11,60	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase taman kehati yang terkelola	%	100,00	232.926.464	100	47.337.954		47.337.954		9.061.951		19,14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	lokasi	1,00	128.583.400,00	1	47.337.954		47.337.954		9.061.951		19,14	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	jumlah dokumen siteplan kehati yang ditetapkan	dokumen	1,00	128.583.400,00	1	47.337.954		47.337.954		9.061.951		19,14	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase Unit Usaha Penghasil Limbah B3 yang tertib aturan	%	100	232.426.464	90	33.527.704		33.527.704		16.207.142		48,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	232.426.464,11	30	33.527.704		33.527.704		16.207.142		48,34	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	232.426.464,11		33.527.704		33.527.704		16.207.142		48,34	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan ketaatan ijin lingkungan	%	100	605.251.864	30	73.391.410		73.391.410		11.230.000		15,30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi	unit usaha	60	605.251.863,75	50	73.391.410		73.391.410		11.230.000		15,30	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha/ kegiatan yang difasilitasi perijinan lingkungannya	usaha/kegiatan	30	304.909.970,89	25	36.440.860		36.440.860		1.500.000		4,12	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi	usaha/kegiatan	30	300.341.892,86	25	36.950.550		36.950.550		9.730.000		26,33	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwijaya tingkat nasional	%	30	632.449.873	10	149.005.520		149.005.520		13.760.000		9,23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	30	632.449.873,25	10	149.005.520		149.005.520		13.760.000		9,23	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	30	632.449.873,25	10	149.005.520		149.005.520		13.760.000		9,23	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan yang terselesaikan	%	100	641.333.479	100	73.843.558		73.843.558		7.260.650		9,83	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengaduan	60	641.333.478,89	20	73.843.558		73.843.558		7.260.650		9,83	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang tertangani	Pengaduan	45	319.536.688,77	15	36.815.585		36.815.585		5.160.650		14,02	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	pengaduan/kasus	15	321.796.790,12	5	37.027.973		37.027.973		2.100.000		5,67	
Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,70		69,70	8.351.117.082	69,70	8.351.117.082		988.953.271		17,74	
													11,84	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	41	61.710.986.449	41	6674390183		6674390183		818.049.354		12,26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	10								
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	103,82	1.238.270.457,41	34,00	688.308.500		688.308.500		97.002.600		14,09	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	103,82	1.238.270.457,41	34,00	688.308.500		688.308.500		97.002.600		14,09	
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	%	100	925.545.561,16	100	273.117.759		273.117.759		41.380.643		15,15	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	dokumen	27	925.545.561,16	10	273.117.759		273.117.759		41.380.643		15,15	
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen	3	4.616.641.548,59	1	995.584.849		995.584.849		40.013.343		4,02	
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan produksi yang tersusun	Dokumen	3	548.256.117,70	1	99.590.400		99.590.400		31.295.283		31,42	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Pemegang Izin Usaha dan Kerjasama di HP yang dinilai	Unit	5	219.652.367,17	5	99.212.525		99.212.525		3.323.525		3,35	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung yang dilaksanakan	kegiatan	6	105.800.954,21	2	8.001.465		8.001.465		501		0,01	
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja KPHP yang dilaksanakan	kegiatan	3	159.370.240,10	1	-		-		-			
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja KPHL yang dilaksanakan	kegiatan	3	138.485.027,18	1	59.959.000		59.959.000		2.050			
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan	unit	15	2.967.996.322,23	5	728.821.459		728.821.459		5.391.985		0,74	
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	41	17.207.045.793,56	41	2.496.430.061		2.496.430.061		133.939.305		5,37	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	112.500	4.624.324.801,33	112.500	48.642.559		48.642.559		8.029.848		16,51	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	211.500	6.947.952.881,86	211.500	641.526.659		641.526.659		116.818.015		18,21	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah kasus Tipihut yang ditangani	kasus	33	1.375.552.817,64	11	1.636.002.001		1.636.002.001		-		-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan	kegiatan	3	1.823.717.677,03	5	-		-		-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani	titik	417	2.435.497.615,71	139	170.258.842		170.258.842		9.091.441		5,34	
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	Unit	24	6.991.212.643,40	12	1.756.703.042		1.756.703.042		468.651.358		26,68	
	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	Unit	12	5.933.545.861,44	12	1.409.668.261		1.409.668.261		391.904.698		27,80	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah IUIPHBK yang difasilitasi	ijin usaha	10	88.746.168,00	5	149.307.473		149.307.473		43.316.924		29,01	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luasan HHBK yang dibudidayakan	ha	102,80	968.920.613,96	33,0	154.541.450		154.541.450		23.519.270		15,22	
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	Industri	11	458.873.190,02	11	43.185.858		43.185.858		9.910.466		22,95	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri	11	458.873.190,02	11	391.726.173		391.726.173		14.950.709		3,82	
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	8.607	30.912.499.242,85	2.869	161.875.000		161.875.000		14.950.000		9,24	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL yang disusun	dokumen	3	206.346.546,23	1	44.851.173		44.851.173		709			
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	3.268,50	25.035.362.413,64	1.090	185.000.000		185.000.000		-		-	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	821.835	5.186.703.821,32	274.000	72.519.800		72.519.800		22.111.396		30,49	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Lokasi RHL yang dibina dan dimonitoring	KPH/Tahura	16	484.086.461,67	16	72.519.800		72.519.800		22.111.396		30,49	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30.503	2.843.299.456	30.503,30	382.888.612		382.888.612		21.588.215		5,64	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit	1	1.927.987.905,79	1	235.572.743		235.572.743		8.361.936		3,55	
	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	luas kawasan TAHURA yang diamankan	ha	3155	585.814.156,74	3155	22.501.703		22.501.703		6.191.157		27,51	
	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Jumlah TSL endemik yang terfasilitasi pengawatannya	jenis	1	321.310.967,94	1	-		-		-			
	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Jumlah kawasan ekosistem wilayah TAHURA yang dipulihkan	ha	366	128.524.387,17	122	-		-		-			
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Sarpras objek wisata yang dibangun	unit	3	715.617.361,57	1	204.000.110		204.000.110		-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah KTH mitra konservasi Tahura yang terbentuk	kelompok	6	144.589.935,57	2	-	-	-	-	-	-	-	
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA yang tersusun	Dokumen	12	32.131.096,79	4	9.070.930		9.070.930		2.170.779			
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	24,00	345.259.559,62	24	42.901.794		42.901.794		7.360.850			
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	24,00	345.259.559,62	24	42.901.794		42.901.794		7.360.850		-	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang terkelola	kelompok	8,00	570.051.990,16	8	104.414.075		104.414.075		5.865.429		5,62	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	16,00	195.869.623,76	16	38.633.200		38.633.200		3.721.929		9,63	
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah KEE dan cagar biosfer yang difasilitasi pengembangannya	kelompok/ lembaga	8,00	374.182.366,40	8	65.780.875		65.780.875		2.143.500		3,26	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	15,93	2.125.242.316	5,49	472.985.036		472.985.036		77.896.612		16,47	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	29	2.921.881.515,56	20	472.985.036		472.985.036		77.896.612		16,47	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	67	137.521.094,28	67	49.261.840		49.261.840		7.200.896		14,62	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Blue ke Gold/Madya	kelompok	37	197.927.556,25	15	374.868.150		374.868.150		63.374.396		16,91	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	kelompok	90	2.464.695.865,03	30	48.855.046		48.855.046		7.321.320		14,99	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	32	14.296.328.273	32	146.875.328		146.875.328		31.318.885		21,32	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS	32	82.983.248.577	32	146.875.328		146.875.328		31.318.885		21,32	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	dokumen	3	328.328.399,48	1	49.116.085		49.116.085		31.318.885			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Neraca pengelolaan sampah (%)	%					85						
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Sampahan		Persentase Penanganan Sampah	%	70,00		70,00	8.414.381.700	70,00	8.414.381.700		1.519.456.475		18,06	
		Persentase Pengurangan Sampah	%	30,00		30,00		30,00						
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah	%	100	15.916.448.484	85	8.414.381.700		8.414.381.700		1.519.456.475		18,06	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase penanganan sampah	%	70	3.148.514.551,19	60	8.414.381.700		8.414.381.700		1.519.456.475		18,06	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional													
	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang beroperasi dengan baik	unit	30	3.148.514.551,19	1	3.430.881.700		3.430.881.700		855.252.000		24,93	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah industri pengolahan sampah dan limbah B3 yang beroperasi	unit	100	3.148.514.551,19	1	-		-		-			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase Pengurangan Sampah	%	30	3.148.514.551,19	25	4.983.500.000		4.983.500.000		664.204.475		13,33	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang operasional	Unit	70	3.148.514.551,19	1	-		-		-			
	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kerjasama Pengolahan Sampah	kerjasama	30	3.148.514.551,19	5								
												0,00	18,59	
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi														
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas		Indeks Daya Beli (Point)	%											
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan		Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	68202	14.101.520.368	68202	1.159.054.950	68202	1.159.054.950		103.630.375		8,94	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan investor	%	10	724.463.980		248.308.040		248.308.040		-		-	DPMPSTP
PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI		Jumlah dokumen	Dokumen	2	311.507.601		248.308.040		248.308.040		-		-	
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dok revisi dan sosialisasi Pergub	Dokumen	1	146.948.355		-		-		-		-	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah dokumen money	Dokumen	1	164.559.246		248.308.040		248.308.040		-		-	
PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI		Jumlah dokumen	%		412.956.380		-		-		-		-	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal	Dokumen	1	101.227.743		-		-		-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah peta potensi	Peta	1	311.728.636									
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah dokumen promosi	%	80	1.050.026.808		150.000.000		150.000.000			-	-	DPMPTSP
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah dokumen	Dokumen		1.050.026.808		150.000.000		150.000.000			-	-	
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan	Dokumen	1	507.278.116		-		-			-	-	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan event	Dokumen	1	542.748.692	1	150.000.000		150.000.000			-	-	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	%	93	780.295.837		12.046.910		12.046.910			-	-	DPMPTSP
Penanaman modal yang ruang lingkungnya lintas kabupaten/ kota		Jumlah Layanan Perizinan kewenangan Provinsi lintas Kab/Kota	Izin	4	120.058.076		-		-			-	-	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah penerbitan izin penanaman modal (NIB) yang ruang lingkungnya lintas kab/kota	Izin	4	120.058.076		-		-			-	-	
Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah Dokumen Layanan Perizinan kewenangan daerah provinsi	Dokumen	3	660.237.761	3	12.046.910		12.046.910			-	-	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik	Jumlah permohonan dan penerbitan izin dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi	Izin dan non izin	3.500	402.744.090	3500	12.046.910		12.046.910			-	-	
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen	Dokumen	2	174.858.775	2	-		-			-	-	
	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen pengaduan	Dokumen	2	82.634.896		-		-			-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang taat LKPM	%	60	1.079.612.988		748.700.000		748.700.000		103.630.375		13,84	DPMPTSP
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Dokumen	4	1.079.612.988		748.700.000		748.700.000		103.630.375		13,84	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah dokumen perusahaan yang dipantau	Dokumen	4	171.888.232	0	-		-			-	-	
	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dibina	Perusahaan	5	541.270.764	5	645.899.800		645.899.800		103.630.000		16,04	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	Perusahaan	20	366.453.992	20	102.800.200		102.800.200		375		0,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023							Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	%	100	171.027.294										DPMPPTSP
Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPPTSP	Dokumen	2	171.027.294										
	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPPTSP secara OSS	Dokumen	2	171.027.294										
													3,98		
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88		23,88	230.828.112.753	23,88	230.828.112.753		28.414.784.229				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertumbuhan Populasi Ternak	persen	10	46.161.000.000	10	39.933.664.016	10	39.933.664.016		3.327.497.225		8,33	Disnakwan	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah Bibit Ternak Unggul Yang Dihasilkan	Ekor	100	1.735.256.154	100	310.546.000	100	310.546.000		118.944.000		38,30		
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	ekor/laporan	85	1.735.256.154	1	310.546.000	1	310.546.000		118.944.000		38,30		
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Luas Lahan HPT yang dikelola	(Ha)	15	1.277.279.138	15	194.997.240	15	194.997.240		72.412.589		37,14		
	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lahan HPT dikelola	(Ha)	21	805.060.426	0		0							
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan yang dihasilkan	(Laporan)	1	472.218.712	2	194.997.240	2	194.997.240		72.412.589		37,14		
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah HPT yang dihasilkan	(Ton)	25	747.344.341	25	568.111.133	25	568.111.133		45.612.347		8,03		
		Jumlah Semen Beku dihasilkan	(Straw)	2	1.311.394.641	2		2							
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah produksi benih HMT	(Ton)	70	747.344.341	25	503.384.990	25	503.384.990		42.972.155		8,54		
		Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang di produksi	laporan	145000	1.120.612.376	2		2							
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Sampel Straw yang diperiksa	(Sampel)	200	180.247.820	200	49.995.000	200	49.995.000		2.640.000		5,28		
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Frekwensi pengawasan yang dilakukan	(Kali)	1	10.534.446	1	14.731.143	1	14.731.143		192		0,00		
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		Distributor Obat Hewan Yang Diawasi	toko/depo	10	63.125.609	10		10							

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Sampel Obat Hewan yang diambil	sampel	10	36.586.113	-	-	0	-	-	-			
	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Laporan yang dihasilkan	laporan	1	26.539.495	-	-	0	-	-	-			
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang Diadakan	ekor	1000	39.526.600.117	1000	38.860.009.643	1000	38.860.009.643		3.090.528.289		7,95	
		Jumlah Alat Pengolah Pakan yang Diadakan	unit	15	1.500.000.000	15		15						
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak sapi/kerbau/kambing/unggas yang diadakan	ekor	1000	37.579.815.152	1.000	38.728.551.400	1000	38.728.551.400	-	3.016.675.500		7,79	
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Kelompok pakan	kelompok	30	1.946.784.965	30	131.458.243	30	131.458.243	-	73.852.789		56,18	
		Jumlah alat pengolah pakan yang diadakan	unit	15	1.500.000.000									
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Cakupan Produksi Hasil Ternak Yang Dipasarkan	pesen	100	582.000.001	100	28.349.153	100	28.349.153		-		20,36	Disnakwan
Penataan Prasarana Pertanian		Unit pelayanan yang terpelihara	unit	9	277.207.623	9	-	9	-		-			
	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah Gedung RSH di Pelihara	(Unit)	1	206.477.480	-	-	0	-	-	-			
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor di pelihara	unit	3	70.730.143	-	-	0	-	-	-			
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang dikembangkan	lokasi	2	304.792.377	2	28.349.153	2	28.349.153		-		-	
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak	laporan	1	149.092.137	1	14.001.000	1	14.001.000		-		-	
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Frekwensi pengawasan	kali	12	155.700.241	12	14.348.153	12	14.348.153	-	-		-	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	persen	<1	2.884.999.999	<1	586.743.495	<1	586.743.495		204.743.575		34,89	Disnakwan
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		PHMS yang dikendalikan	penyakit	5	980.180.067	5	208.409.228	5	208.409.228		55.032.857		26,41	
	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Vaksin Anthrax, SE dan AI yang diadakan (Dosis)	dosis/ jenis	30000	344.800.812	30.050	103.877.684	30050	103.877.684		20.174.585		19,42	
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pmetaan yang dihasilkan	Dokumen	1	216.182.805	1	44.999.975	1	44.999.975		4.720.000		10,49	
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah obat hewan dan peralatan pelayanan	(jenis)	20	419.196.451	40	59.531.569	40	59.531.569		30.138.272		50,63	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan/RPH/RPU/TPH diawasi	unit	61	531.226.609	61	43.671.430	61	43.671.430		1.120.718		2,57	
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan Hasil penilain resiko keamanan produk hewan	laporan	1	191.801.772	1	14.525.375	1	14.525.375	-	1.120.000		7,71	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Frekwensi Pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	kali	4	178.840.198	4	14.145.955	4	14.145.955		718		0,01	
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Frekwensi pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas provinsi	kali	12	160.584.639	12	15.000.100	12	15.000.100		-		-	
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil Peternakan yang Tersertifikasi		5	936.320.191	5	309.662.838	5	309.662.838		148.590.000		47,98	
	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah RPH/ Unit Usaha Produk Ternak Ber NKV	sertifikat	5	218.156.134	-	-	0	-	-	-		-	
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah UMKM Ber NKV/ Bersertifikat	sertifikat	15	505.889.844	15	235.000.000	15	235.000.000	-	139.860.000		59,51	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan laboratorium penyakit hewan yang tersedia	(Pnyakit)	5	212.274.213	5	74.662.838	5	74.662.838	-	8.730.000		11,69	
Kesejahteraan Hewan		Jumlah Pemotongan Betina Produktif yang Dikendalikan Di RPH	persen	1	437.273.131	1	25.000.000	1	25.000.000		-		-	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah peserta bimtek NKV	orang	50	217.242.515	0	-	0	-	-	-		-	
	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah RPH Diawasi	unit	61	220.030.616	61	25.000.000	61	25.000.000		-		-	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	persen	100	436.021.633	100	1.286.589.681	100	1.286.589.681		43.334.215		3,37	Disnakwan
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	kegiatan	10	260.536.230	10	44.714.881	10	44.714.881		2.860.000		6,40	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Frekwensi expo/pameran	kegiatan	10	260.536.230	10	44.714.881	10	44.714.881		2.860.000		6,40	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah Kelompok Berbasis Korporasi	korporasi	3	175.485.402	3	1.241.874.800	3	1.241.874.800		40.474.215		3,26	
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Orang di bimtek	(Orang)	30	93.430.599	3	1.191.874.800	3	1.191.874.800	-	32.872.905		2,76	
	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Laporan yang dihasilkan	(Laporan)	4	44.498.718	5	50.000.000	5	50.000.000	-	7.601.310		15,20	
	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Dokumen yang dihasilkan	(dokumen)	4	37.556.085	0	-	0	-	-	-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%	2,05	64.204.913.319	1,99	20.910.025.116		20.910.025.116		608.839.465		2,91	Distanbun
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				75	14.375.159.070		12.712.240.105		12.712.240.105		17.190.000		0,14	
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian pra panen yang diadakan/ diserahkan ke kelompok tani		75	14.375.159.070		12.712.240.105		12.712.240.105		17.190.000		0,14	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				4048	49.305.227.080		8197785011		8197785011		591.649.465		7,22	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikasi benih perkebunan yang terbit		273	35.677.829.400		60.501.500		60.501.500		9.000.509			
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Luasan bantuan benih hortikultura		148	7.006.789.800		898.659.042		898.659.042		33.020.700		3,67	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Luas bantuan benih tanaman pangan		2.370	6.620.607.880		369.510.740		369.510.740		274.929.736		74,40	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Luas bantuan pengembangan tanaman perkebunan		1.530	35.677.829.400		6.869.113.729		6.869.113.729		274.698.520		4,00	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase ketersediaan benih tanaman	%	498	6.620.607.880									
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Benih Bermutu Tanaman Pangan		498	6.620.607.880									
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase ketersediaan benih tanaman	%	444.885	71.355.658.800									
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikasi benih perkebunan yang terbit		273	35.677.829.400									
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih /bibit sumber perkebunan		444.612	35.677.829.400									
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase ketersediaan benih tanaman	%	5.793	35.677.829.400									
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah kebun benih yang direhabilitasi		5.793	35.677.829.400									
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	96,79	267.360.989.055		132.931.324.028		132.931.324.028		21.880.314.983		16,46	Distanbun
		Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/paket	10	-		1,32931E+11		1,32931E+11		21.880.314.983			
Penataan Prasarana Pertanian				708	210.857.059.574		90.305.683.589		90.305.683.589		16.145.480.449		17,88	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani Yang Dibuat/dibangun		553	111.490.096.051		15.771.129.321		15.771.129.321		2.444.990.000		15,50	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Yang Dibuat/dibangun		153	35.937.090.995		3.645.297.673		3.645.297.673		374.530.534		10,27	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Unit prasarana pertanian lainnya yang diadakan		2	63.429.872.528		23.209.213.445		23.209.213.445		2.915.314.000		12,56	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,5	1.229.042.136	96	32.209.291		32.209.291		17.459.956		54,21	Distanbun
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luasan Pengendalian OPT (Perkebunan)		1995	802.442.000		32.209.291		32.209.291		17.459.956		54,21	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luasan Pengendalian OPT (Perkebunan)		1995	802.442.000									
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						32.209.291		32.209.291		17.459.956			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	18.894.573.000	70	32.209.291		32.209.291		17.459.956		54,21	Distanbun
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Persentase BPP yang meningkat klasifikasi kelas BPP nya	%	607	7.854.246.000		582.294.220		582.294.220		94.642.723		16,25	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah siswa SMKP Pertanian Mtrm yang difasilitasi		607	7.854.246.000		582.294.220		582.294.220		94.642.723		16,25	
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Persentase BPP yang meningkat klasifikasi kelas BPP nya	%	360	7.854.246.000		582.294.220		582.294.220		94.642.723		16,25	
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah siswa SMKP Pertanian Bima yang difasilitasi		360	7.854.246.000		0		0		-			
	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian (ASN/THL dan Swadaya/Swasta) Yang ditingkatkan kapasitasnya		640	2.546.319.100		0		0		-			
	KERJA Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah penyuluh ASN/THL yang ditingkatkan kapasitasnya		490	1.785.504.100		0		0		-			
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Cakupan wilayah laut, pesisir dan PPK yang terkelola secara berkelanjutan	%			4,51	4.608.045.272		4.608.045.272		437.370.840		9,49	Dislutkan
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas ruang laut dan pesisir yang terkelola	Ha			126.311	4.055.244.277		4.055.244.277		112.710.840		2,78	
	Penyusunan dan penetapan rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					12.00	76.244.000		76.244.000		1.244.000		1,63	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri	Ha			10	3.979.000.277		3.979.000.277		111.466.840		2,80	
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah pelaku usaha Pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi yg sudah berizin	Unit				3.000.995		3.000.995		-		-	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah pelaku usaha Pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi yg sudah berizin	Unit				3.000.995		3.000.995		-		-	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		jumlah masyarakat pesisir mandiri	orang				549.800.000		549.800.000		324.660.000		59,05	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	produksi garam rakyat	Ton				549.800.000		549.800.000		324.660.000		59,05	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	Ton			249.099	24.536.036.087		24.536.036.087		1.429.584.238		5,83	Dislutkan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Produksi Perikanan tangkap Non Pelabuhan	Ton			227.099	2.792.452.810		2.792.452.810		1.039.744.498		37,23	
	Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Data dan informasi statistik perikanan tangkap	dok			30	0		0		-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						0		0					
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil	unit			75.00	2.792.452.810		2.792.452.810		1.039.744.498		37,23	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT							2.000.275		2.000.275		-			
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT						0		0		-			
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT						1.000.275		1.000.275		-			
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT						1.000.000		1.000.000		-			
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil							0		0		-			
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil						0		0		-			
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil						0		0		-			
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							0		0		-			
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT						0		0		-			
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT						0		0		-			
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM	unit			500.00	21.739.583.002		21.739.583.002		389.839.740		1,79	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan					1.00	1.000.000		1.000.000					
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan	unit			50.00	19.717.085.000		19.717.085.000		382.859.740		1,94	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						2.021.498.002		2.021.498.002		6.980.000			
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit	izin			200.00	0		0		-			
	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah penerbitan persetujuan	dokumen			500.00	0		0		-			
Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT							2.000.000		2.000.000		-			
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						1.000.000		1.000.000		-			
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						1.000.000		1.000.000		-			
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							0		0		-			
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT						0		0		-			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (termasuk budidaya lobster, KRPL/P2L)		Produksi Perikanan Budidaya	Ton			1.219.005	4.327.098.949		4.327.098.949		427.112.101		9,87	Dislutkan
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							968		968		-			
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						968		968		-			
Pengelolaan Pembudidayaan ikan di laut		Jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan d laut yang tersedia	unit			5	4.327.097.981		4.327.097.981		427.112.101		9,87	
	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut	Jumlah penyediaan unit prasarana budidaya ikan di laut	unit			15.00	423.195.000		423.195.000		24.982.000		5,90	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang tersedia	paket			3,00	1.544.732.700		1.544.732.700		130.711.800		8,46	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan di laut	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di laut yang tersedia	unit			200.000	500.250.000		500.250.000		111.614.600		22,31	
	Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kab/kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan air payau dan ikan air tawar yang tersedia	unit				1.858.920.281		1.858.920.281		159.803.701		8,60	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%			99,92	1.395.855.150		1.395.855.150		15.066.775		1,08	Dislutkan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%			99,92	1.395.855.150		1.395.855.150		15.066.775		1,08	
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Dokumen				120.000.000		120.000.000		-		-	
		Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang terawasi	unit				354855150		354855150		11.006.775			
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	unit				1.000.000		1.000.000		-		-	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang terbina di CDK Bidom	kelompok				920.000.000		920.000.000		4.060.000		0,44	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi olahan hasil perikanan	Ton			214373	196.962.217		196.962.217		6.000.900		3,05	Dislutkan
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya	izin			5	23001005,9		23001005,9		-			
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						3001005,9		3001005,9		-			
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil yang valid dan akurat	Dokumen				20000000		20000000		-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Produksi olahan hasil perikanan dari pelaku usaha yang menerapkan GMP	ton				168.961.211		168.961.211		6.000.000		3,55	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah rekomendasi sertifikat keamanan pangan (good Manufacturing Procedure) yang terbit	Dokumen				168.961.211		168.961.211		6.000.000		3,55	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah stok ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	ton				5.000.000		5.000.000		900		0,02	
	Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan						1.000.000		1.000.000		900			
	Pemberian Insentif dan fasilitasi bagi pelaku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah pelaku usaha yang menerima insentif dan fasilitasi	orang				4.000.000		4.000.000		-		-	
													14,94	
Sasaran 3: Meningkatkan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin		Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100,00		100,00	34.385.909.686	100,00	34.385.909.686		8.735.478.796		25,404	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	-	85							24,71	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	2.356.150.635	100	437.784.340		437.784.340		135.702.973		38,63	Dinas Sosial
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Jumlah PMB,KPO dan KTK yang dipulangkan ke daerah asal	Jiwa				437.784.340,00		437.784.340,00		135.702.973		0,00	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Orang PMB,KPO dan KTK yang diberikan Fasilitas Pemulangan ke Daerah Asal	Jiwa				437.784.340,00		437.784.340,00		135.702.973		35,22	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4,5	53.397.902.044	3,5	13.687.459.471		13.687.459.471		7.432.321.169		54,30	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Jumah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	Jiwa				2.191.719.800		2.191.719.800		1.065.185.755		48,60	
	Penyediaan Permakanan	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dasar dalam Panti	Jiwa				1.293.820.000		1.293.820.000		426.233.950		32,94	
	Penyediaan Sandang	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dasar dalam Panti	Jiwa				32.000.000		32.000.000		-		-	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumah disabilitas mental yang diberikan kebutuhan pengasramaan dalam Panti	Jiwa				39.500.000,00		39.500.000,00		-		-	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumah penyandang disabilitas yang diberikan kebutuhan alat bantu/ aksesabilitas	Jiwa				590.000.000		590.000.000		574.770.000		97,42	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dalam Panti	Jiwa				106.623.400		106.623.400		44.615.305		41,84	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah disabilitas mental yang diberikan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial dalam Panti	Jiwa				79.476.000		79.476.000		19.566.500		24,62	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah disabilitas mental yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	Jiwa				-		-		-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Laporan	Laporan				50.300.400,00		50.300.400,00		-			
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumah anak terlantar yang tertangani	Jiwa				7.471.044.574		7.471.044.574		4.677.762.102		62,61	
	Pengasuhan	Jumah anak terlantar yang diberikan pemenuhan pengasuhan dalam Panti	Jiwa				90.000.000		90.000.000		37.500.000		41,67	
	Penyediaan Makanan	Jumah anak terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dasar dalam Panti	Jiwa				1.967.345.000		1.967.345.000		685.887.500		34,86	
	Penyediaan Sandang	Jumah anak terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dasar dalam Panti	Jiwa				140.700.000		140.700.000		98.800.000		70,22	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumah anak terlantar yang diberikan kebutuhan pengasramaan dalam Panti	Jiwa				93.014.500		93.014.500		40.820.308		43,89	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang diberikan kebutuhan perbekalan kesehatan dalam Panti	Jiwa				66.263.650		66.263.650		17.256.202		26,04	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang diberikan bimbingan fisik, mental dan sosial dalam Panti	Jiwa				568.208.400		568.208.400		197.688.292		34,79	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang diberikan layanan pendidikan dasar dalam Panti	Jiwa				296.125.000		296.125.000		94.540.000		31,93	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang diberikan kebutuhan reunifikasi dalam Panti	Jiwa				81.000.000		81.000.000		26.110.000		32,23	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan penanganan korban tindak kekerasan anak	Jiwa				4.168.388.024		4.168.388.024		3.479.159.800		83,47	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumah lanjut ar yang tertangani	Orang				2.223.025.277		2.223.025.277		790.467.675		35,56	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia terlantar yang di berikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Panti	Orang				1.744.800.000		1.744.800.000		548.699.575		31,45	
	Penyediaan Sandang	Kapasitas Lansia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang dalam Panti	Orang				105.798.750		105.798.750		103.420.000		97,75	
	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah LANSIA terlantar yang mendapatkan kebutuhan pengasramaan dalam panti	Orang				104.871.200		104.871.200		44.228.900		42,17	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah ketersediaan alat bantu bagi Lansia dalam panti	Orang											
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lansia yang mendapatkan fasilitas kesehatan dalam panti	Orang				120.255.327		120.255.327		52.147.400		43,36	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dapan Panti	Orang				79.000.000		79.000.000		20.450.000		25,89	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	Orang				5.100.000		5.100.000		1.800		0,04	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lansia terlantar dalam panti pemerintah yang mendapatkan reunifikasi	Orang				33.500.000		33.500.000		6.800.000		20,30	
	Pemulasaraan	Jumlah Lansia terlantar dalam panti pemerintah yang dapat layanan pemulasaraan	Orang				29.700.000		29.700.000		14.720.000		49,56	
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti					861.885.014		861.885.014		453.098.637		52,57	
	Penyediaan Permakanaan	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanaan dalam Panti	Orang				361.095.000		361.095.000		238.606.275		66,08	
	Penyediaan Sandang	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dalam Panti	Orang				60.079.000		60.079.000		53.601.000		89,22	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan asrama dalam Panti	Orang				8.406.700		8.406.700		3.904.100		46,44	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam Panti	Orang				8.124.262		8.124.262		7.757.262		95,48	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Bimbingan dalam Panti	Orang				66.900.000		66.900.000		42.300.000		63,23	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumah Gepeng yang diberikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam Panti	Orang											
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumah Gepeng yang diberikan Bimbingan keterampilan dasar dalam Panti	Orang				310.780.000		310.780.000		98.280.000		31,62	
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanaan dalam Panti	Orang											
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Laporan	Laporan				46.500.052		46.500.052		8.650.000		18,60	
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti					939.784.807		939.784.807		445.807.000		47,44	
	Penyediaan Permakanaan	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan permakanaan di dalam panti	Orang				363.000.000		363.000.000		173.232.000		47,72	
	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan sandang di dalam panti	Orang				44.075.000		44.075.000		44.075.000		100,00	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan sarana prasaran asrama/wisma di dalam panti	Orang				10.275.000		10.275.000		10.275.000		100,00	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan kesehatan di dalam panti	Orang				49.634.700		49.634.700		15.875.000		31,98	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan dalam panti	Orang				45.000.000		45.000.000		15.080.000		33,51	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam panti	Orang				4.800.000		4.800.000		-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Tingkat konsumsi energi	KKal/kapita/hari	2.640,80	9.373.297.884	2.563,50								
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tingkat akurasi data laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Persen	100,00	770.949.100	100,00	112.556.446		112.556.446		35.786.917		31,79	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Ketersediaan Pangan	Dokumen	2	303.393.880	2	28.942.559		28.942.559		11.351.059		39,22	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Stok Cadangan Masyarakat (CPM)	Ton	25	230.000.000	10	24.670.330		24.670.330		9.615.190		38,97	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan	Dokumen	6	265.000.600	2	29.285.216		29.285.216		10.054.669		34,33	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah LDPM/PUPM/Pasar Mintra Tani yang dibina	Unit	3	275.948.500	1	29.658.342		29.658.342		4.766.000		16,07	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Kadar air maksimal Cadangan Pangan Pemerintah (Persen)	Persen	14,00	1.018.510.000	14,00	659.975.025		659.975.025		6.150.000		0,93	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi	Ton	45	1.018.510.000	15	659.975.025		659.975.025		6.150.000		0,93	
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	Persen	90	9.373.297.884	90	114.477.789		114.477.789		6.701.039		5,85	
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti	Event	3	242.509.084	1	15.614.651		15.614.651		651		0,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSA)	Jumlah KRPL/P2L yang dikembangkan	P2L	144	9.130.788.800	40	98.863.138		98.863.138		6.700.388		6,78	
		Jumlah orang yang menerima informasi Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Orang	3600	-	1200								
Program Penanganan Kerawanan Pangan		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	Persen	3,77	1.268.451.063	4,77	100.000.000		100.000.000		20.685.500		20,69	Dinas Ketahanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Persentase Penurunan Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	1	1.268.451.063	1	100.000.000		100.000.000		20.685.500		20,69	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Kelompok/sekolah yang ditumbuhkan dalam rangka penanganan kerawanan pangan	Kelompok/ Sekolah	8	540.951.063	3	30.000.000		30.000.000		17.190.000			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penduduk yang difasilitasi bantuan hibah pangan	Orang	1500	727.500.000	500	70.000.000		70.000.000		3.495.500		4,99	
Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	90	1.857.153.698	85,00	136.298.305		136.298.305		30.218.118		22,17	Dinas Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1) Tingkat akurasi informasi pangan segar berbasis data pengawasan	Persen	100	495.420.000	100	136.298.305		136.298.305		30.218.118		22,17	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Orang	150	495.420.000	50	29.365.136		29.365.136		-		-	
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang disertifikasi dan diawasi	Persen	80	828.192.667	80	48.497.604		48.497.604		13.087.604		26,99	
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi Bimwas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persen	80	533.541.031	80	40.000.000		40.000.000		17.129.000		42,82	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji	Kali	100	252.737.289	4	18.435.566		18.435.566		1.514		0,01	
			Komoditi	100	280.803.742	20	26.100.000	20	26.100.000		22.260.000		17,04	
Sasaran 5: Terpuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Air Minum	%	80,59		80,59	1828072885,60	80,59	1828072885,60		1.270.205.300		69,48	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Cakupan air minum	%	80,59	10.224.348.000	78,45	1.828.072.885,6		1.828.072.885,6		1.270.205.300		69,48	Dinas PUPR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	SR			240	1.828.072.885,6		1.828.072.885,6		1.270.205.300		69,48	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis SPAM yang tersusun	Dok			4	-		-		-			
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	SR			240	1.828.072.885,6		1.828.072.885,6		1.270.205.300		69,48	
													69,48	
Sasaran 5: Terpuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46		82,46	401.664.617.400	82,46	401.664.617.400		121.315.677.093		30,20	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100		97,00								Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	253391,4	587.290.665.869	84.488	401.664.617.400		401.664.617.400		121.315.677.093		30,20	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Luasan Prasarana dalam kondisi baik	Ha											
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		Tersedianya prasarana sarana utilitas Permukiman	%	100	587.290.665.869	100	401.664.617.400		401.664.617.400		121.315.677.093		30,20	
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersedianya Perencanaan penyediaan PSU Permukiman	dok	3	1.029.079.161	1	-		-		-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Tersedianya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi permukiman	paket	2931	586.261.586.708	814	401.664.617.400		401.664.617.400		121.315.677.093		30,20	
													30,20	
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Rasio Elektrifikasi	%	99,99	18.005.408.000	99,99	273.362.717	99,99	273.362.717		53.143.320		19,44	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Prosentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	%	19,18	1882329210	19	105609567,7	19	105609567,7		29.503.320	-	27,94	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PENATAUSAHAAN IZIN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN (SEPULUH RIBU) TON PER TAHUN		Persentase kelompok tani dan pengusaha yang lulus bimtek perizinan niaga BBN sebagai bahan bakar lain dengan nilai diatas 70	%	100	214456005,9	100	22752249,7	100	22752249,7		15.683.320	-	68,93	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10,000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	6	131729920,1	2	8751249,8	2	8751249,8		5.003.320	-	57,17	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10,000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Izin	Izin	6	82726085,73	2	14000999,9	2	14000999,9		10.680.000	-	76,28	
PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI WILAYAH PROVINSI		Persentase masyarakat yang lulus sosialisasi konservasi energi dengan nilai diatas 75	%	80	1667873204	80	82857318	80	82857318		13.820.000		16,68	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	356100248,8	1	10000497,4	1	10000497,4		3.440.000	-	34,40	
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Orang	Orang	300	268073492,3	75	13510661,6	75	13510661,6		7.500.000	-	55,51	
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun	Unit	46	1043699463	0	59346159	0	59346159		2.880.000		4,85	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	RT	2900	5379628786	100	167753149	100	167753149		23.640.000	-	14,09	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PENATAUSAHAAN IZIN USAH PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SERTA PENYEWAAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI		Jumlah Izin	Izin		285942199	82		82						
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pertek	Pertek	90	178715304,1	50		50						
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin	Izin	90	107226894,9	32		32						
PENATAUSAHAAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI	PENATAUSAHAAN IZIN OPERASI yang FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI	Jumlah izin operasi ketenagalistrikan yang dikendalikan	Izin	90	285885367,4	0	34251399	0	34251399		7.860.000		22,95	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	Rekomendasi	90	178694215,6	0	14001399	0	14001399		3.100.000		22,14	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	Izin	90	107191151,8	0	20250000	0	20250000		4.760.000		23,51	
PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PEDESAAN		Jumlah Rumah Tangga Sasaran	RTS	2900,000	4807801220	60	133501750	60	133501750		15.780.000		11,82	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	268073492,3	0	0	0	0		-			
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun	RTS	2900,000	4539727728	60	133501750	60	133501750		15.780.000		11,82	
											0,00		32,01	
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95		68,95	420.125.755	68,95	420.125.755		7.995.681		1,90	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	7.063.959.946	100	420.125.755		420.125.755		7.995.681		1,90	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Rumah tangga menempati hunian layak	%	98,91	-	98,86								
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			%	100	1.227.471.539	100	28.171.651		28.171.651		855		0,00	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Terdatanya tingkat kerusakan rumah akibat bencana	dok	3	620.411.785	1	13.336.182		13.336.182		312		0,00	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Terdatanya dan terverifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi	%	100	607.059.754	100	14.835.470		14.835.470		543		0,00	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			%	100	997.844.228	100	315.901.132		315.901.132		7.994.170		2,53	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	ok	210	425.158.412	70	12.400.632		12.400.632		-		-	
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP						303.500.500		303.500.500		7.994.170			
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			%	100	4.838.644.180	100	76.052.972		76.052.972		656		0,00	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	unit	169	4.838.644.180	60	76.052.972		76.052.972		656		0,00	
													0,56	
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Inflasi	%	3,0 - 4,0		3,0 - 4,0	8.729.996.670	3,0 - 4,0	8.729.996.670		1.552.001.011		17,78	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	Persen	80	874.409.856	70	166.017.685		166.017.685		61.920.000		37,30	Dinas Perdagangan
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)		Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor	Pertimbangan Teknis	7	90.000.000	6	44.182.019		44.182.019		17.420.000		39,43	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP - MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP - MB bagi Distributor yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	7	90.000.000	6	44.182.019		44.182.019		17.420.000		39,43	
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) diterbitkan Bagi Distributor	Pertimbangan Teknis	6	93.000.000	6	43.602.398		43.602.398		13.940.000		31,97	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	6	93.000.000	6	43.602.398		43.602.398		13.940.000		31,97	
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	Usaha	7	186.000.000	6	78.233.269		78.233.269		30.560.000		39,06	
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	6	93.000.000	6	39.148.852		39.148.852		11.680.000		29,83	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	6	93.000.000	6	39.084.417		39.084.417		18.880.000		48,31	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	4	5.179.316.326	4	736.689.315		736.689.315		650.731.602		88,33	Dinas Perdagangan
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga Di Tingkat Provinsi	Komoditi	32	80.000.000	32	38.727.574		38.727.574		23.610.428		60,97	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	8	40.000.000	7	24.531.750		24.531.750		15.701.157		64,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	8	40.000.000	7	14.195.824		14.195.824		7.909.271		55,72	
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Jumlah Komoditi Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi	Komoditi	32	250.000.000	32	663.580.121		663.580.121		610.301.655		91,97	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	100.000.000	12	32.327.373		32.327.373		20.383.385		63,05	
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	12	150.000.000	11	631.252.748		631.252.748		589.918.270		93,45	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya							34.381.619		34.381.619		16.819.519			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023							Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi						34.381.619			34.381.619		16.819.519			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA)	Persen	7	4.070.555.572	5	297.074.936			297.074.936		29.695.650		10,00	Dinas Perdagangan
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah UKM Berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	UKM	6	1.800.000.000	5	297.074.936			297.074.936		29.695.650		10,00	
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	12	850.000.000	10	46.500.000			46.500.000		-		-	
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	40	200.000.000	38	-			-		-		-	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	12	300.000.000	11	67.126.310			67.126.310		6.235.650		-	
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	12	250.000.000	11	105.000.717			105.000.717		-		-	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	10	200.000.000	10	78.447.909			78.447.909		23.460.000		29,91	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Cakupan Penyelesaian Sengketa	Persen	90	3.914.544.303	85	1.479.250.197			1.479.250.197		605.170.000		40,91	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus Sengketa Konsumen Yang Ditangani Di Seluruh di Kab/Kota	Kasus	55	2.280.000.000	50	1.419.148.945			1.419.148.945		600.000.000		42,28	
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	55	90.000.000	50	1.413.737.900			1.413.737.900		600.000.000		42,44	
	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Terjalin Kerjasama	LPKSM	4	290.000.000	4	2.594.345			2.594.345		-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang ditangani	Pengaduan	4	1.900.000.000	3	2.816.700			2.816.700		-		-	
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Komoditi Teruji	Komoditi	60	180.000.000	50	23.354.247			23.354.247		-		-	
	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	55	90.000.000	50	23.354.247			23.354.247		-		-	
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Toko Retail di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar / Jasa	Toko/Retail	4	90.000.000	5	36.747.005			36.747.005		5.170.000		14,07	
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	10	90.000.000	8	11.500.750			11.500.750		5.170.000		44,95	
	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	10	90.000.000	10	25.246.255			25.246.255		-		-	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (Termasuk : Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall)		Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	Persen	100	37.550.068.505	100	6.050.964.537			6.050.964.537		204.483.758		3,38	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi	Produk	30	5.894.639.381	40	5.655.064.187			5.655.064.187		120.559.830		2,13	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM	200	5.894.639.381	175	5.655.064.187		5.655.064.187		120.559.830		2,13	
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan	Jenis Produk	14	2.000.000.000	12	353.650.100		353.650.100		82.923.712		23,45	
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	200	2.000.000.000	175	353.650.100		353.650.100		82.923.712		23,45	
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UKM Terakomodir di Retail	UKM	30	370.000.000	25	42.250.250		42.250.250		1.000.216		2,37	
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	4	175.000.000	3	-		-		-			
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	12	95.000.000	12	42.250.250		42.250.250		1.000.216		2,37	
													29,96	
Sasaran 7:		Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp0,00	11943,70		11943,70	3.993.500.000	11943,70	3.993.500.000		825.617.000		20,67	
Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup														
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	100	4.833.875.000	100	3.993.500.000		3.993.500.000		825.617.000		20,67	Dinas Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Jumlah Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Kab/Kota	10	8.680.000.000	10	3.993.500.000		3.993.500.000		825.617.000		20,67	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1300	8.500.000.000	1200	3.993.500.000		3.993.500.000		825.617.000		20,67	
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas	Kali	175	180.000.000	150								
													20,67	
Tujuan 2:		Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%											
Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan														
Sasaran 1:		Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	137,24	35.356.295.970	137,24	14.104.836.576	137,24	14.104.836.576		2.851.357.714		20,22	
Meningkatnya daya saing pariwisata														
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Peningkatan Persentase Destinasi Pariwisata Yang Minimal Dikembangkan	%	100	16.580.012.830	85,86	6185197124		6185197124		1.268.211.729		20,50	Dinas Pariwisata
		Persentase Geosite yang tertata	%	50	-	50								
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi							10.000.000		10.000.000		6.000.000		60,00	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi						10.000.000		10.000.000		6.000.000		60,00	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan	Kawasan	11	2.000.408.500	11	9.625.375		9.625.375		1.600.840		16,63	
	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	2	325.955.000	-	0		0		-			
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Pariwisata	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	378.843.500	-	0		0		-			
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Yang Minimal Berkembang	Kawasan	1	750.075.000	11	9.625.375		9.625.375		1.600.840		16,63	
							9.625.375							

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	4	545.535.000	-				0				
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Daya tarik Destinasi Pariwisata Rintisan Yang Minimal Berkembang	%	14,14	2.500.000.000	85,86		6.156.570.750		6.156.570.750				20,48
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Pariwisata Yang Minimal Berkembang	Destinasi	17	1.959.749.800	11 KSPD				5.703.834.777		1.260.609.390		21,74
	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Tersedia dan terpelihara	Unit	3	540.250.200	-				452.735.973				4,59
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten, Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Daya Tarik Destinasi Pariwisata Yang Minimal Berkembang	Desa Wisata	30	1.040.011.000	85,86				9.000.999		1.499		0,02
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata Yang Terbina	Desa Wisata	3 paporan	651.583.000	2000 Tempat Usaha				9.000.999		1.499		0,02
	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	98	388.428.000	-				0				
Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang		7.391.905.747	2.000.000		3.849.524.492		3.849.524.492		1.281.185.886		33,28
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%		5.036.461.400	20		3.849.524.492		3.849.524.492		1.281.185.886		33,28
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Media	5	1.341.839.200	3		1.218.533.200		1.218.533.200		602.001.136		49,40
	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Event Pariwisata Yang Terlaksana	Event	13	2.756.400.000	50		2.549.645.000		2.549.645.000		677.949.500		26,59
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data Publikasi Pariwisata	Publikasi	4	300.005.000	12		3.346.292		3.346.292		1.235.250		36,91
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kemitraan Pemasaran Pariwisata Yang Terjalin	Perjanjian	5	638.217.200	15		78.000.000		78.000.000		-		-
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Persentase HaKI Yang Telah Memberikan Kontribusi Dalam Pertambahan Nilai Ekonomi Kreatif	%		606.633.173	35,21		3.957.628.824		3.957.628.824		297.970.099		7,53
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Tersertifikasi HaKI	Orang	10	5.270.345.000	12		3.957.628.824		3.957.628.824		297.970.099		7,53
	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota kreatif Yang Tersedia	Unit	1	150.000.000	-		-		-		-		-
	Perluasan Pasar Produktif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dipasarkan didalam dan luar negeri	Produk	14	2.143.212.500	10		3.800.794.047		3.800.794.047		237.969.649		6,26
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Ruang Kreasi dan Jumlah Orang Kreatif yang Terbina	Pelaku Ekraf	6	1.200.000.000	10		136.834.777		136.834.777		60.000.450		43,85
	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha kreatif Sepanjang Rantai Produksi Dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha kreatif Sepanjang Rantai Produksi Dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	1	277.132.500	-		-		-		-		-

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah usaha kreatif bagi pemula yang terdata	Per Sub Sektor	3	1.500.000.000	12	20.000.000		20.000.000					
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Meningkatnya Pemngelolaan kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif	%	5	200.000.000	-	-		-					
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	200.000.000	-	-		-					
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase SDM Penunjang Layanan Pariwisata Yang Memenuhi Standar	%		3.506.228.054	70	112.486.137		112.486.137		3.990.000		3,55	Dinas Pariwisata
Pelaksanaan Peningkatan Kapastias Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dilatih	Orang	5	2.500.000.000	50	112.486.137		112.486.137		3.990.000		3,55	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	120	1.035.093.720	-	-		-		-			
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pokdarwis yang di Latih	Pokdarwis	240	253.661.760	30	56.834.777		56.834.777		-		-	
	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata bidang Homestay dan Pemandu wisata yang dilatih	Orang	480	242.380.800	50	55.651.360		55.651.360		3.990.000		7,17	
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	50	634.431.860	-	-		-		-			
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	20	266.651.860	-	-		-		-			
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	67.780.000	-	-		-		-			
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul		Pertumbuhan Industri (%)	%											
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri		Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	179,91		179,91	13.127.820.164	179,91	13.127.820.164		2.624.724.340		19,99	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	102.322.211.223	100	6.695.238.848		6.695.238.848		1.614.702.974		24,12	Dinas Perindustrian
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	IKM			100	6.695.238.848		6.695.238.848		1.614.702.974		24,12	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen			1	82.600.570		82.600.570		47.288.000		57,25	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan industri	IKM			40	75.000.000		75.000.000		14.197.860		18,93	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM Tembaku yang mendapatkan pelatihan pengembangan industri	IKM			100	152.167.276		152.167.276		4.481.268		2,94	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terlatih industri kerajinan dan permesinan	IKM			80	1.149.486.207		1.149.486.207		256.043.551		22,27	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapat sarana dan prasarana industri	IKM			200	5.235.984.795		5.235.984.795		1.292.692.295		24,69	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen laporan evaluasi kineja daerah yang tersusun	dokumen			1	-		-		-		-	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase IKM yang Meningkatkan dari Kecil ke Menengah	%	3,55	3.018.338.892	140	1.224.800.520		1.224.800.520		-		-	Dinas Perindustrian
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Jumlah perizinan dan perluasan usaha industri NTB yang terfasilitasi	IKM			140	1.224.800.520		1.224.800.520		-		-	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi perizinan industri	IKM			140	161.000.000		161.000.000		-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah masterplan kawasan industri halal NTB yang tersusun	dokumen			2	1.063.800.520		1.063.800.520		-		-	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	2.043.024.494	1	120.000.000		120.000.000		6.439.260		32,76	Dinas Perindustrian
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%			1	120.000.000		120.000.000		6.439.260		5,37	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen data industri yang tersusun	dokumen			1	45.000.000		45.000.000		-		-	
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Ikm yang mendapat sertifikat pelatihan industri kreatif	IKM			80	75.000.000		75.000.000		6.439.260		8,59	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SINas	Jumlah IKM yang di pantau dan dievaluasi	IKM			100								
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6,71	4.806.536.363	6,35	409.413.544	409.413.544	409.413.544	6.882.065		1,68		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan							409.413.544		409.413.544	6.882.065		1,68		
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan						378.033.300		378.033.300	6.882.065		1,82		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan						31.380.244		31.380.244	-				
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	56,75	7.967.004.066	53,53	752.756.584	752.756.584	752.756.584	204.831.705		27,21		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dilatih	orang											
		Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dibina	orang											
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			orang				752.756.584		752.756.584	204.831.705		27,21		
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi						416.560.984		416.560.984	204.831.705		49,17		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM						336.195.600		336.195.600	-				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		1. Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%		100	100	3.925.610.669	3.925.610.669	3.925.610.669	791.868.336		20,17		Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Presentase pemuda peserta pelatihan yang bersertifikat	%		100	100								
Kegiatan 1 : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan KewenanganProvinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang		160	160	3.925.610.669		3.925.610.669	791.868.336		20,17		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub kegiatan 1 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tk. Provinsi yang terseleksi	Orang		15	15	116.250.751		116.250.751		16.250.751		13,98	
	Sub kegiatan 2 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Dilatih	Orang		100	100	23.847.654		23.847.654		7.572.604		31,75	
	Sub kegiatan 3 : Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang		18	18	0		0		-			
	Sub kegiatan 4 :Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan	Unit		2	2	1.068.386.890		1.068.386.890		56.386.989		5,28	
	Sub kegiatan 5 : Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi	Lembaga		20	51	2.610.000.000		2.610.000.000		700.000.000		26,82	
	Sub kegiatan 6 : Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda	Orang		60	20	107.125.375		107.125.375		11.657.994		10,88	
													16,39	
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	0,00	79.821.458.869	0,00	2.647.319.372	0,00	2.647.319.372		467.429.920		17,66	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	3.481.991.780	18	1.419.748.595	18	642.085.737		16.318.655	-	2,54	Dsinakertranas
Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi		Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang	300	3.241.733.400	462	1.329.846.805	470	627.145.287		3.022.950	-	0,48	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi [BID. LATTAS]	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Orang	750	1.092.070.448	300	466.025.747	300				-		
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi [BLK]	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang	384	2.044.288.965	160	811.134.065	160	367.654.787		3.022.950	-	0,82	
	Sub kegiatan Koordinasi Lintas lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Lembaga	6	105.373.987	2	52.686.993	10	259.490.500		-	-	-	
Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	lembaga LPK	100	147.454.000	40	58.000.000	10	13.295.906		13.295.705	-	100,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub Kegiatan Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS].	Jumlah LPK yang di Akreditasi	lembaga LPK	100	147.454.000	40	58.000.000	10	13.295.906		13.295.705	-	100,00	
Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	55	92.804.380	20	31.901.790	20	1.644.544		-	-	-	
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja [BLK]	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	55	92.804.380	20	31.901.790	20	1.644.544		-	-	-	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan.	%	57,48	3.391.251.944	57,48	1.284.310.532	57,48	354.169.915		13.469.968	-	3,80	Dsinakertrans
Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota		jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL		480	910.699.800	160	303.566.600	30	18.539.550		3.000.746	-	16,19	
	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	Orang	480	910.699.800	160	303.566.600	30	18.539.550		3.000.746	-	16,19	
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	5.250	388.974.000	2.000	129.658.000	2000	13.652.932		1.250.000	-	9,16	
	Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	5.250	388.974.000	2.000	129.658.000	2000	13.652.932		1.250.000	-	9,16	
Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi		Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	orang	26.438	1.995.499.514	29.240	794.085.932	29140	316.438.378		9.219.223	-	2,91	
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) /pekerja migran Indonesia	Jumlah PMI bermaslah yang ditangani	orang	5.250	618.360.000	1.600	281.120.000	1600	94.466.200		9.218.466	-	9,76	
	Penyediaan Layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah PMI ke luar negeri yang dilayani di LTSA	orang	70.500	1.033.252.214	27.500	398.336.832	27500	3.832.216		756	-	0,02	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	orang	260	343.887.300	140	114.629.100	40	218.139.962		-	-	-	
Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu)Daerah Provinsi		Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	orang	95	96.078.630	95	57.000.000	95	5.539.055		-	-	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi [BID. PENEMPATAN]	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	orang	95	96.078.630	95	57.000.000	95	5.539.055		-	-	-	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan perusahaan	%	23	1.170.630.908	23	388.419.557	23	1.267.521.165		346.391.165	-	27,33	Dsinakertrans

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	270	743.997.600	100,00	282.999.200,00	19	35.341.165,10		10.391.165	-	29,40	
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	Perusahaan	270	447.631.500	100	169.210.500	50	22.891.165		10.391.165	-	45,39	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan Melalui Perjanjian Kerjasama Tripartit	Lembaga	11	296.366.100	11	113.788.700	11	12.450.000		-	-	-	
Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)		Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen	11	426.633.308	11	105.420.357	11	1.232.180.000		336.000.000	-	27,27	
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK [BID. HI]	Jumlah jenis dokumen upah minimum yang ditetapkan	Dokumen	11	281.633.308	11	50.420.357	11	12.500.000		-	-	-	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminian Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga kerja yang mendapat perlindungan jaminan sosial	orang	3750	145.000.000	1500	55.000.000	11000						
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		Porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	3.466.483.655	23	2.010.700.279	23	383.542.555		91.250.132	-	23,79	Dsinakertrans
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3		2.950	3.466.483.655	1.025	2.010.700.279	195	383.542.555		91.250.132	-	23,79	
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusahaan	225	269.601.295	90	102.101.462	0	85.203.800		19.341.964		22,70	
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	315	320.895.558	110	121.527.256	50				-		
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya Di Pulau Lombok	Perusahaan	260	232.905.050	95	888.204.124	25				-		
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusahaan	195	319.634.697	75	121.049.752	25	69.476.049		20.166.590	-	29,03	
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	90	219.346.694	35	83.069.401	25				-		
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya	Perusahaan	255	350.935.019	90	132.903.584	25	228.862.706		51.741.578	-	22,61	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian		
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Lombok	Perusahaan	1.500	1.521.653.120	500	576.269.519	20							
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	335	231.512.222	120	87.676.643	25							
												0,00	17,41		
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan															
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Indeks Kriminalitas	Point												
Sasaran 1: Meningkatkan Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase penurunan konflik sosial	%	0,00	5.552.000.000	0,00	88.795.960.884	0,00	88.795.960.884		10.738.537.634		12,09		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase pembinaan ideologi wawasan dan Karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	1.526.591.849	10	999.006.594		999.006.594		252.605.410		25,29	Bakesbangpo Idagri	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	1	562.456.540,81	1	999.006.594		999.006.594		252.605.410		25,29		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1	-	1									
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1	383.444.004,09	1	835.006.594,40		835.006.594,40		161.018.030		19,28		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1	146.337.288,67	1	164.000.000		164.000.000		91.587.380		55,85		
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK (Termasuk Bale Mediasi)		Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	11.105.209.927	10,53	5.559.597.969		5.559.597.969		1.644.953.250		29,59	Bakesbangpo Idagri	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	1	3.191.596.560,53	1	5.559.597.969		5.559.597.969		1.644.953.250		29,59		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	855.085.701,90	1	2.255.445.000		2.255.445.000		445.370.950		19,75	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	303.454.831,72	1	211.450.899		211.450.899		113.342.300		53,60	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	125.732.088,37	1	50.000.660		50.000.660		49.240.000		98,48	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	1	1.907.323.938,74	1	3.042.701.410		3.042.701.410		1.037.000.000		34,08	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292.643.073.798	100	76.244.570.149		76.244.570.149		7.884.574.724		10,34	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual	Kali	2375	100.348.573.728	793	36.412.213.500,00		36.412.213.500,00		7.160.344.565		19,66	
	Sub Kegiatan 1 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kali	2370	89.954.926.705	790	34.169.265.240,00		34.169.265.240,00		7.137.583.175		20,89	
	Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual Yang Terfasilitasi	Lembaga	5	10.393.647.022	3	2.242.948.260		2.242.948.260		22.761.390		1,01	
Kegiatan 2 : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	Dokumen	27	190.236.028.124	5	39.382.787.918,00		39.382.787.918,00		639.953.027		1,62	
	Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	12	186.708.519.065	2	26.476.844.900,00		26.476.844.900,00		73.669.000		0,28	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	10	3.025.514.118	2	215.000.000,00		215.000.000,00		59.622.500		27,73	
	Sub Kegiatan 3 : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sosial	Dokumen	5	501.994.941	1	12.690.943.018,00		12.690.943.018,00		506.661.527		3,99	
Kegiatan 3: Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Dokumen	3	2.058.471.946	3	449.568.731,20		449.568.731,20		84.277.131		18,75	
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Dokumen	1	855.856.277	1	124.569.131		124.569.131		30.340.431		24,36	
	Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	1	424.296.999	1	199.999.800,00		199.999.800,00		31.213.300		15,61	
	Sub Kegiatan 3 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	1	778.318.670	1	124.999.800,00		124.999.800,00		22.723.400		18,18	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Bumdes Berprestasi	%	37	9.389.913.516	37	2.014.853.150	37	2.014.853.150		526.923.060		26,15	DPMDes Dukcapil
		Persentase Lembaga Adat Aktif	%	100		100		100						
		Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100		100		100						
		Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96		64,96		64,96						
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten / Kota	%	70	9.389.913.516	70	2.014.853.150	70	2.014.853.150		526.923.060		91,42	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Lembaga Adat	Orang	50	961.311.217	30	179.700.300	30	179.700.300		11.120.280		99,78	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Kali	3	416.990.000	3	439.800.200	3	439.800.200		29.648.310		85,08	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemerintahan Desa	Kali	3	6.290.659.154	3	155.500.500	3	155.500.500		59.022.487		98,92	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kali	4	284.961.117	4	120.501.500	4	120.501.500		25.451.500		99,71	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta Bimtek Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Orang	45	244.592.028	45	119.350.650	45	119.350.650		1.680.483		98,79	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Hibah uang yang diserahkan	Tahun	1	1.191.400.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		400.000.000		100,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81,82	6.405.431.759	72,73	3.403.601.881	3.403.601.881	3.403.601.881		324.646.010		9,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							789.925.000		789.925.000		158.610.000		20,08	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						-		-		-			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						526.045.000		526.045.000		56.160.000		10,68	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya						263.880.000		263.880.000		102.450.000			
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi							1.210.075.000		1.210.075.000		166.036.010		13,72	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						1.210.075.000		1.210.075.000		166.036.010		13,72	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						-		-		-			
Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							1.403.601.881		1.403.601.881		-		-	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						-		-		-			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Lembaga penerima hibah Uang / Barang	Lembaga				1.403.601.881		1.403.601.881		-		-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat						-		-		-			
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1.426.928.736	100	159.218.800		159.218.800		6.286.900		3,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten / Kota							159.218.800		159.218.800		6.286.900		3,95	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah peserta peningkatan SDM dan Pentas seni budaya ke luar daerah	Orang				159.218.800		159.218.800		6.286.900		3,95	
	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan						-		-		-			
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						-		-		-			
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Cakupan pembinaan sejarah	%	100	719.796.541	100	415.112.340		415.112.340		98.548.280		23,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi							415.112.340		415.112.340		98.548.280		23,74	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah peserta pembinaan SDM lembaga sejarah	Orang				415.112.340		415.112.340		98.548.280		23,74	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah						-		-		-			
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah						-		-		-			
	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal						-		-		-			
													32,65	
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07		6,07	6.921.983.489	6,07	6.921.983.489		2.169.571.574		31,34	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100,00	11.445.268.038	100,00	5.293.309.929		5.293.309.929		1.391.069.272		26,28	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	-	100,00								
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	15	407.322.754	16	1.936.257.511		1.936.257.511		747.465.182		38,60	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	Kali	36	245.315.689	12	1.098.139.861		1.098.139.861		363.758.903		33,13	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus	15	1.008.191.008	16	202.022.150		202.022.150		26.343.100		13,04	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali	6	147.583.899	2	-		-		-			
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum						199.999.900		199.999.900		98.631.439		49,32	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia						252.712.100		252.712.100		158.459.240		62,70	
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama	3	199.508.733	1	80.000.000		80.000.000		-			
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum						100.633.500		100.633.500		100.272.500			
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						-		-		-			
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali	36	207.814.021	12	2.750.000		2.750.000		-		-	
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	16	3.577.534.823	17	3.266.801.948		3.266.801.948		623.799.915		19,10	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan						800.000.000		800.000.000		189.060.600			
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali	36	2.740.669.153	12	46.801.948		46.801.948		-		-	
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali	36	37.665.904	12								
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus	16	799.199.765	17	2.420.000.000		2.420.000.000		434.739.315		17,96	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang	131	658.247.230	43	90.250.470		90.250.470		19.804.176			
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	120	458.447.988	40	90.250.470		90.250.470		19.804.176			
		Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang	11		3								
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas	5	199.799.242	2	-		-		-			
		Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	5		2								
		Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	12		4								
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (Termasuk Desa Bersinar)		Persentase Desa bersinar	%	86,21	2.436.780.947	68,96	729.344.800		729.344.800		192.509.060		26,39	Bakesbangpo Idagri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	1	848.629.511,12	1	729.344.800		729.344.800		192.509.060		26,39	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	-	1	360.676.900		360.676.900		78.531.740		21,77	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	253.260.060,03	1	293.787.900		293.787.900		70.412.200		23,97	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	241.026.358,63	1	74.880.000		74.880.000		43.565.120		58,18	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	100	5.727.596.770	100	899.328.760	100	899.328.760		585.993.242		65,16	Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas	%	100		100								
		Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Pertama	%	100		100								
		Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Banding	%	100		100								
		Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Kasasi	%	100		100								
		Persentase Perkara Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan melalui mediasi	%	100		100								
		Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDIH, Media Sosial yang berkualitas	%	100		100								
Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		Persentase fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah, MoU dan Perjanjian Kerjasama	%	100	3.900.653.457,15	100	499.325.610	100	499.325.610		372.133.242		74,53	
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang terbentuk	Perda	50	937.240.588,17	10	99.590.410	10	99.590.410		97.440.000	-	97,84	
			Perkada	150		30		30				-		
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang terbentuk	Kept. Gub	3500	468.619.122,53	700	100.010.200	700	100.010.200		82.980.000	-	82,97	
	Sub kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Terdokumentasi dan tersosialisasi kepada masyarakat	Produk Hukum/Perda/Perkada	200	1.222.824.591,97	40	150.020.500	40	150.020.500		71.701.700	-	47,79	
		Jumlah MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	Naskah	125		25		25				-		
	Sub kegiatan : Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi dan terevaluasi	Perda	250	1.271.969.154,48	50	149.704.500	50	149.704.500		120.011.542	-	80,17	
			Perbup/Perwal	500		100		100				-		
Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase kasus-kasus hukum yang terfasilitasi	%	100	1.826.943.312,55	100	400.003.150	100	400.003.150		213.860.000	-	53,46	
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah penanganan masalah hukum (Litigasi)	Perkara	20	904.765.524,92	4	350.002.900	4	350.002.900		169.880.000	-	48,54	
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Non Litigasi dan HAM	Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	Perkara	20	922.177.787,63	4	50.000.250	4	50.000.250		43.980.000	-	87,96	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi HAM (RANHAM)	Dokumen	15		3		3						
												0,00	43,97	
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%											
Sasaran 3: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1,00	4.602.682.612	1,00	8.893.244.455	1,00	8.893.244.455		281.878.295		3,17	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik	%	100	43.528.305.431	90	7.003.708.705		7.003.708.705		206.639.785		3,0	Bakesbangpo Idagri

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	33.671.239.085,96	1	7.003.708.705		7.003.708.705		206.639.785		2,95	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Dokumen	1	33.148.535.456,60	1	6.586.198.100		6.586.198.100		-		-	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	279.641.097,96	1	244.885.000		244.885.000		102.432.940		41,83	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	278.062.531,40	1	172.625.605		172.625.605		104.206.845		60,37	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang Aktif	%	83,01	1.631.097.489	81,35	1.889.535.750		1.889.535.750		75.238.510		3,98	Bakesbangpo Idagri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	1	1.600.137.061,11	1	1.889.535.750		#####		75.238.510		3,98	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	1	1.368.000.489,35	1	1.633.300.000		#####		32.250.000		1,97	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	1	172.786.649,34	1	193.640.750		193.640.750		-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.- (Layanan)		50	85033000	50	85.033.000	50	85.033.000					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek	Orang	10	623.069.651	10	106.736.247	10	106.736.247		34.700.800		32,51	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek	Orang	30	485.114.904	30	56.558.850	30	56.558.850		7.830.800		13,85	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.	Orang	500	137.954.747	50	50.177.397	50	50.177.397		26.870.000		53,55	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Index Ketahanan Keluarga	%	5,5	525.129.408	5,5	70.087.915	5,5	70.087.915		13.267.215		18,93	DP3AP2KB
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga	Desa	3	525.129.408	3	70.087.915	3	70.087.915		13.267.215		18,93	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Motekar Terlatih	Orang	60	363.018.623	60	24.415.585	60	24.415.585		8.045.585		32,95	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puspaga Kewenangan Provinsi	Persen	50	162.110.785	50	45.672.330	50	45.672.330		5.221.630		11,43	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Dokumen Gender	Dokumen	1 Dok	90.540.440	1	17.700.300	1	17700300		4.200.300			DP3AP2KB
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Buku Gender dan Anak	Dokumen	1 Dok	90.540.440	1	17.700.300	1	17700300		4.200.300			
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Buku Gender dan Anak	Dokumen	1 Dok	90.540.440	1	17.700.300	1	17700300		4.200.300			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	100,00	618.134.168	100,00	360.275.870	100,00	360.275.870		87.483.320		24,28	DP3AP2KB
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		Jml Peserta Advokasi dan Temu Anak	Orang	250	618.134.168	250	360.275.870	250	360.275.870		87.483.320		24,28	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jml Peserta Advokasi dan Edukasi Pembentukan Forum Anak	Orang	250	292.754.857	250	192.725.120	250	192.725.120		85.408.320		44,32	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi (Temu Forum Anak Tk. Provinsi)	Persen	1 Dok	325.379.312	1	167.550.750	1	167.550.750		2.075.000		1,24	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen	100,00	817.988.306	100,00	339.423.300	100,00	339.423.300		33.015.000		9,73	DP3AP2KB
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan kan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kotan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			-		94.725.000		94.725.000		-		-	
	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	Jml Kab/Kota Layak Anak		1 Dok	94.725.000	1	94.725.000	1	94.725.000		-		-	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				80	169.471.000	80	169.471.000	80	169.471.000		32.015.000			
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			70	169.471.000	70	-	70	-		-			
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	Berita	240	432.470.345		169.471.000		169.471.000		32.015.000		18,89	
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (UPTD)		Orang	300	122.860.293		-		-		-			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kemampuan aktivis perlindungan anak dari kekerasan	Tahun	11	641.199.655	11	75.227.300	11	75.227.300		1.000.000		1,33	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 36 orang	%	1 Dok	477.930.107	1 Dok		1 Dok	75.227.300		1.000.000		1,33	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemahaman Penyalahgunaan Napza dan PMS sebanyak 300 anak	Orang	1200	399.399.869	400	-	400	-		-			
													15,39	
													23,78	